



**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Oleh:

Fauzi Chuzlan Alauddin

NPM : 4316500059

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal
2020**



**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

Fauzi Chuzlan Alauddin

NPM : 4316500059

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal
2020**



**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA**

(Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)

SKRIPSI

Oleh:

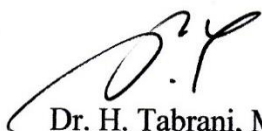
Fauzi Chuzlan Alauddin

NPM : 4316500059


Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal : 07 Juli 2020

Dosen Pembimbing I


Dr. H. Tabrani, M.M
NIDN. 0612126001

Dosen Pembimbing II


Yanti Puji Astuti, S.E, M.Si, CMA
NIDN. 0014097401

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi


Aminul Fajri, S.E, M.Si
NIDN. 0602037002

Pengesahan Skripsi

Nama : Fauzi Chuzlan Alauddin
NPM : 4316500059
Judul : Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Juli 2020

Ketua Penguji



Dr. H. Tabrani, M.M
NIDN. 0612126001

Penguji I



Subekti, S.E., M.Si
NIDN. 0618056602

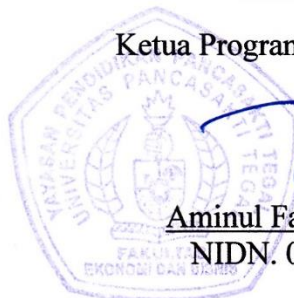
Penguji II



Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M
NIDN. 0615057601

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Aminul Fajri, S.E., M.Si
NIDN. 0602037002

MOTTO:

Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” .

(QS. Ar. Ra'd : 11).

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali terlihat mustahil. Kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. Karena yakin merupakan sebuah kunci jawaban dari sebuah permasalahan

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Nurma Firdous dan Ibunda Nurma Kurniasih yang tiada henti memberikan doa, perhatian, kasih sayang, motivasi, semangat dan nasehat yang begitu berarti bagi penulis.
2. Adik ku yang tersayang, Nurma Syafik Najmuddin yang memberikan nuansa ceria disaat lagi susah.
3. Untuk Teman Dan Sahabat Seperjuangan “Akuntansi C 2016” yang telah menemani, mendukung dan memberikan suport kepada saya
4. Almamaterku Universitas Pancasakti Tegal.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fauzi Chuzlan Alauddin

NPM : 4316500059

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan /atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, 29 Mei 2020

Yang menyatakan



Fauzi Chuzlan Alauddin

ABSTRAK

Fauzi Chuzlan Alauddin, 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 80 responden dengan pihak pengelola dana desa yang terdiri Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner, diproses dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampel jenuh*. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai koefisien uji t sebesar 4,040 dan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,025$. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai koefisien uji t sebesar 5,109 dan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,025$ dan pemanfaatan teknologi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai koefisien uji t sebesar -3,246 dan tingkat signifikansi sebesar $0,02 < 0,025$.

Kata kunci : Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

Fauzi Chuzlan Alauddin, 2020. *This study aims to determine the positive influence of Apparatus Competence, Community Participation and Utilization of Information Technology on Village Fund Management Accountability (Village Case Study in Tarub Subdistrict, Tegal Regency).*

This type of research is a quantitative study with a sample of 80 respondents with the village fund manager consisting of the village head, village secretary, village treasurer and BPD. The data of this study were collected through a questionnaire, processed and analyzed using multiple regression analysis using SPSS version 23. The sampling technique used was saturated samples. While the data analysis used is data quality test, descriptive analysis, classic assumption test, and hypothesis testing.

The results of this study indicate that the apparatus competence has a positive and significant effect on the accountability of village fund management with a t-test coefficient of 4.040 and a significance level of $0.00 < 0.025$. Community participation has a positive and significant effect on village fund management accountability with a t-test coefficient value of 5.109 and a significance level of $0.00 < 0.025$ and the use of technology has a negative and significant effect on village fund management accountability with a t-test coefficient value of -3,246 and a significance level of $0.02 < 0.025$.

Keywords : *Apparatus Competence, Community Participation, Information Technology Utilization, Village Fund Management Accountability*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas segala rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari bahwa dari awal, proses, dan hingga terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan, bimbingan, dorongan dan do'a dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau :

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E, M.M, Akt, C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Aminul Fajri, S.E, M.Si, Akt, selaku Ketua Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. H. Tabrani, M.M, selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan bimbingan, nasehat dan dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsi penelitian ini.
4. Yanti Puji Astuti, S.E, M.Si, CMA, selaku Dosen Pembimbing II telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan senantiasa sabar memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal yang memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat kepada penulis.

5. Orang tua dan keluarga tercinta yang memberikan bantuan moril, material, arahan dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.

Kami menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 16 April 2020

Fauzi Chuzlan Alauddin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	11
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.....	13
3. Kompetensi Aparatur	24
4. Partispasi Masyarakat.....	38
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi	51
6. Dana Desa.....	54
7. Pengelola Keuangan Desa	56
B. Penelitian Terdahulu.....	63
C. Kerangka Konseptual Penelitian	68
D. Hipotesis	70
BAB III METODE PENELITIAN	72
A. Jenis Penelitian	72

B.	Populasi dan Sampel.....	72
C.	Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variable	75
1.	Definisi Konseptual.....	75
2.	Definisi Operasional Variabel	76
D.	Metode Pengumpulan Data	77
E.	Uji Kualitas Data	78
1.	Uji Validitas	78
2.	Uji Reliabilitas.....	79
F.	Metode Analisis Data	79
1.	Statistik Deskriptif.....	79
2.	Uji Asumsi Klasik	79
3.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	80
4.	Pengujian Hipotesis	81
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	83
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	83
1.	Kondisi Wilayah.....	83
2.	Kependudukan.....	84
3.	Anggaran ADD Tiap Desa di Kecamatan Tarub.....	85
4.	Struktur Pemerintahan Kecamatan Tarub	87
B.	Hasil Penelitian.....	89
1.	Deskripsi Data	89
3.	Uji Kualitas Data	93
4.	Uji Statistik Deskriptif.....	96
5.	Uji Asumsi Klasik	97
6.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	101
7.	Pengujian Hipotesis	103
C.	Pembahasan	106
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	110
A.	Kesimpulan.....	110
B.	Saran	111
C.	Keterbatasan Penelitian	111
	DAFTAR PUSTAKA	113
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2. 1 Penelitian Terdahulu.....	63
3. 1 Sampel Data	72
3. 2 Operasionalisasi Variable.....	76
4. 1 Daftar Penduduk Kecamatan Tarub	84
4. 2 Anggaran Dana Desa.....	85
4. 3 Distribusi Penyebaran Kuesioner	89
4. 4 Tingkat Pengembalian Kuesioner	90
4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	91
4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	92
4. 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	92
4. 8 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	93
4. 9 Hasil Uji Validitas	94
4. 10 Hasil Uji Reliabilitas	96
4. 11 Hasil Uji Statistik Deskriptif	97
4. 12 Hasil Uji Normalitas.....	98
4. 13 Hasil Uji Multikolonieritas.....	101
4. 14 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	102
4. 15 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	104
4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Pemikiran	70
4. 1 Peta Kecamatan Tarub.....	83
4. 2 Struktur Pemerintahan Kantor Kecamatan Tarub	88
4. 3 Gambar Histogram Uji Normalitas	99
4. 4 Gambar Normal Plot Uji Normalitas.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	119
2. Surat Izin Penelitian	127
3. Bukti Pengambilan Data.....	129
4. Dokumentasi Pengisian Kuesioner.....	133
5. Dokumentasi Pembangunan Desa Menggunakan Dana Desa.....	134
6. Dokumentasi Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	135
7. Data Hasil Penelitian	136
8. Uji Kualitas Data	148
9. Nilai r Tabel	156
10. Uji Asumsi Klasik	157
11. Pengujian Hipotesis.....	159
12. Nilai t Tabel.....	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sistem pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan desa sebagai tolak ukur dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Untuk mencapai proses tersebut upaya pemerintah salah satunya adalah memberikan dana desa yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dikelola oleh masyarakat yang bertujuan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Sugiarti & Yudianto, 2017). Setiap desa diberi kewenangan dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan sendiri. Kewenangan itu disebut dengan desentralisasi yaitu suatu bentuk tata pemerintahan dimana kewenangan dan kekuasaan tidak terpusat, melainkan menyebar ke daerah-daerah seperti dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Desa diterapkan mulai tahun 2015. Aturan tentang desa diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 yang mengandung kebijakan tata kelola desa dimana kebijakan tersebut memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Presiden Republik Indonesia, 2014). Kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran dana desa dalam jumlah besar disalurkan kepada seluruh desa di Indonesia. Dana desa dalam jumlah besar sudah dianggarkan oleh pemerintah, setiap tahun penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa.

Selain itu, pemerintah juga membuat Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah melimpahkan kekuasaan kepada desa secara otonom adalah untuk meletakkan dasar pembangunan yang di mulai dari tingkat desa. Kemudian bisa dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) selama 5 Tahun yaitu dari 2015-2019 yang memberi amanat untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa.

Menurut Swalem (1997) dalam (Saragih & Agung, 2017) bahwa pembangunan masyarakat desa diawali dari pendekatan kemasyaraatan seperti partisipasi masyarakat dan pengorganisasian dan pelaksanaannya mengarah pada inisiatif dan daya kreasi masyarakat. Pembangunan desa mempunyai penafsian yang bermacam-macam yang di dalamnya terkandung pengertian pembangunan masyarakat desa, dimana terhubungnya berbagai usaha pemerintah dan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang melingkupi beberapa komponen (Amrullah, (1983) dalam Saragih & Agung (2017)).

Keefektifan dana desa dapat dilihat juga dari kemampuan pendamping desa dalam merumuskan kegiatan keseharian yang nyata dari masyarakat sebagai gerakan sosial dan penyadaran hak-hak mereka sebagai warga desa. Meskipun demikian, pendamping desa sebenarnya hanya berlaku sementara untuk menjadikan desa yang mandiri, sejahtera, dan demokratis. Berkaitan dengan kinerja dan kompetensinya, pendamping desa seharusnya berperan sebagai

agensi perantara (*intermediary agency*) yang mampu memperantarai antara kepentingan masyarakat dengan institusi desa maupun kepentingan desa. Hal ini terjadi bahwa seringkali persoalan yang terjadi di desa tidak dapat diselesaikan sepenuhnya oleh desa. Banyak kasus penyelewengan keuangan desa atau penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam kegiatan pembangunan, pemerintah pusat juga menugaskan para pendamping di desa untuk mendampingi warga desa, terutama aparat desa dalam menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dalam persiapan perencanaan pembangunan. Semua perencanaan dan mekanisme terwujudnya pembangunan desa akan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Anggaran Biaya Desa (RAB Desa). Dalam mekanisme terwujudnya pembangunan agar tepat dan sesuai rencana, peran anggota masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat itu sendiri nanti yang akan menentukan program apa atau pembangunan yang bagaimana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi paling utama. Peran seluruh pemangku kepentingan dalam mensukseskan program pembangunan sangat diperlukan terutama bagaimana program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan, yaitu mensejahterakan masyarakat. `

Menurut Kemenkeu, Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada awal tahun 2015 yaitu sebesar 20,7 Triliun, kemudian tahun 2016 meningkat sebesar Rp 47 Triliun, kemudian pada tahun 2017 menjadi 50 Triliun, selanjutnya tahun 2018 meningkat lagi yaitu sebesar 60 Triliun dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi 73 Triliun (Oji / Humas Setkab, 2019). Tujuan adanya ADD ini adalah untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa ini secara khusus diberikan dengan harapan dapat mengurangi desa yang tertinggal dan menumbuhkan desa menjadi mandiri.

Menurut Kemendes PDTT, selama ini telah melampaui target dengan mengentaskan 6.518 desa tertinggal dan 2.665 desa berkembang meningkat status menjadi mandiri, ditetapkannya 144 kawasan transmigrasi serta terbangun, berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB), tertanganinya 40 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kemudian terentaskannya 62 kabupaten daerah tertinggal. Selama hampir lima tahun sejak alokasi dana desa disalurkan, banyak desa di Indonesia yang telah berhasil membangun sebuah infrastruktur dasar dalam jumlah besar dan masif, yang dapat diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dasar dan juga untuk mendukung serta membantu kegiatan-kegiatan ekonomi di desa. Adapun pembangunan tersebut di antaranya jalan desa sepanjang 201.899 kilometer, 1.181.659 meter jembatan, 966.350 unit sarana air bersih, 10.101 unit Polindes, 60.274 unit irigasi, 31.376.550 meter drainase, 5.605 unit tambatan perahu, 38.140 kegiatan BUMDes, 4.265 unit embung, 260.039 unit MCK, 9.329 unit

pasar desa, 53.002 unit PAUD, 26.271 unit Posyandu, 48.953 unit sumur, 21.118 unit sarana olahraga (Arfin, 2019).

Dalam pengelolaan keuangan dana desa, pemerintah desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa agar pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin dalam anggaran. Dalam pengelolaan dana desa harus diimbangi dengan aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang salah satu azasnya yaitu akuntabilitas.

Menurut Chomariyah et al. (2016), Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak bisa tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan dipemerintahan desa, demi terselenggaranya kesejahteraan dan partisipasi masyarakat desa.

Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa (Widyatama & Novita, 2017). Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya. Menurut Moeheriono (2018), kompetensi menghubungkan antara pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta nilai-

nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibanya secara efektif, efisien dan profesional. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya, dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya (Medianti, 2018).

Selain itu, untuk mengurangi munculnya kesalahan dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga semakin tinggi. Semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan juga semakin baik. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula (Medianti, 2018).

Dalam pengelolaan dana desa pemanfaatan teknologi informasi juga dibutuhkan karena dapat memberi kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya (Perdana, 2018). Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan prosedur kerja secara elektronik agar layanan publik tidak mahal dan dapat secara mudah di akses oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tiga potensi masalah terkait dana desa, menyusul kajian yang telah dilakukan pada 2015-2019. Pertama terkait masalah regulasi, permasalahan muncul dikarenakan belum lengkapnya petunjuk, regulasi dan pelaksanaan yang dibutuhkan didalam pengelolaan keuangan desa. Masalah regulasi tersebut berpotensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Hal ini dapat menyebabkan laporan pertanggungjawaban desa tidak efisien dan efektif. Masalah itu karena metode penghitungan dana desa dinilai hanya didasarkan pada dasar pemerataan dan belum transparan (Hayat, 2019).

Kedua potensi masalah didalam tata laksana, kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit ditaati oleh desa. Satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan referensi oleh desa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak tersedia dan APBDesa yang disusun tidak semuanya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Transparansi rencana dalam penggunaan APBDesa masih sangat rendah dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa tidak mengikuti standar yang ada dan rawan dimanipulasi (Hayat, 2019).

Ketiga, analisis lembaga antirasuah juga mendeteksi potensi masalah dalam hal pengawasan. KPK menemukan efektivitas Inspektorat Daerah dalam menjalankan pengawasan pada pengelolaan keuangan. Tidak hanya itu, media pengaduan masyarakat tidak dikelola dan dirawat dengan baik oleh semua daerah juga ruang lingkup pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh

camat belum jelas. Terakhir, adanya potensi masalah sumber daya manusia (SDM). Hal ini terjadi dikarenakan tenaga pendamping dapat melakukan suatu korupsi maupun fraud dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (Hayat, 2019).

Beberapa penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas (2019) tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.

Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan

Tujuan penelitian adalah menjawab dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis pada akuntansi pemerintahan berupa bukti tentang pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - b. Dapat dijadikan untuk bahan perbandingan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan mahasiswa dalam melakukan penelitian terkait Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Serta untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas bagi perkembangan studi akuntansi.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut di bidang keuangan desa serta dapat menambah literatur pada perpustakaan sehingga memberi manfaat bagi para pembaca.

c. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat desa dan masyarakat dalam menjalankan dan mengawal pemerintahan, terutama kepala desa dalam hal membuat kebijakan sehingga dapat menentukan proporsi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang optimal demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan antara *principal* dan agen. Landasan utama teori ini menjelaskan tentang hubungan atau interaksi kerja antara pihak pemberi wewenang atau *principal* dan pihak penerima wewenang atau *agent* yaitu manajer, dalam konteks kontrak kerja sama. Teori agensi mempunyai anggapan bahwa setiap individu hanya terpengaruh oleh kebutuhan dirinya sendiri sehingga memunculkan konflik antara *principal* dan *agent*. Hal tersebut timbul karena adanya pembatasan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah keagenan ini memicu biaya keagenan (*agency cost*) yang bakal ditanggung baik oleh prinsipal maupun agen. Teori yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) mengelompokkan biaya keagenan menjadi 3 macam, yaitu *residual loss*, *monitoring cost* dan *bonding cost*. *Residual loss* merupakan pengorbanan atau loyalitas yang berupa menurunnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan prinsipal dan keputusan agen. *Monitoring cost* adalah anggaran biaya yang muncul dan dijamin oleh *principal* untuk memantau perilaku agen seperti mengamati, mengukur dan mengontrol perilaku agen. Selanjutnya *Bonding cost* adalah anggaran biaya yang dijamin oleh agen

untuk menentukan dan mematuhi prosedur dan menanggung bahwa agen akan berbuat atau bertindak untuk kepentingan prinsipal.

Adanya tujuan yang berbeda antara *principal* dan *agent* akan menimbulkan masalah keagenan. Menurut Fama & Jensen (1983), menyatakan bahwa masalah agensi digerakkan oleh sistem pengambilan keputusan yang membagi fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Umumnya organisasi sektor publik diciptakan atas dasar *Agency Theory*. Diakuinya atau tidak di pemerintah daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Abdullah, 2005).

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah desa sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dan berbuat dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah desa tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sewajarnya untuk kepentingan masyarakat. *Agency theory* berpendapat bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak *agent* (pemerintah) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* memungkinkan terjadinya permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Nurkhasanah, 2019).

Keterkaitan dengan adanya teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (*agent*) untuk menyajikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi mengelola keuangan dana desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi mensyaratkan bahwa mereka yang memegang posisi kepercayaan publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan menyediakan informasi secara terbuka mengenai laporan pengelolaan dana desa. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa ini artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan terjadinya permasalahan pada pengelolaan dana desa juga menjadi lebih kecil.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

a. Pengertian Akuntabilitas

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris (*account-tability*) yang berarti keadaan yang dapat di pertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat di pertanggungjawabkan. Menurut pandangan Dwiyanto (2012) dalam Banga (2017), akuntabilitas adalah pertanggungjawaban para pembuat kebijakan kepada warga. Ini berarti bahwa diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pemerintah atau eksekutif sebagai penentu kebijakan sekaligus sebagai eksekutor kebijakan terhadap warga masyarakat guna mengetahui sudah sejauh mana pihak pemerintah telah merealisasikan kebijakannya dalam usaha untuk memenuhi keinginan masyarakat.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2000), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak dan berhak meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas mengandung unsur penting untuk melindungi nilai-nilai seperti prediktibilitas, efisiensi, efektifitas dan reliabilitas. Sebuah akuntabilitas tidak abstrak tetapi kongkrit dan wajib diputuskan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat khusus yang menyangkut masalah apa yang harus dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah pemberian laporan dan pengungkapan (*disclosure*) dari aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam satu kurun waktu tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini tentunya baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi laporan dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk mengetahui bahwa sudah sejauh mana pemerintah memberi pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran.

Lembaga Administrasi Negara RI memberikan pengertian bahwa akuntabilitas dalam kinerja instansi pemerintah daerah adalah pelaksanaan kewajiban sebuah instansi pemerintah untuk memper-tanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk menggapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan melalui sebuah alat

pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut :

- 1) *Inputs*, adalah tolak ukur kinerja menurut besarnya sumber dana, sumberdaya manusia, material, waktu, teknologis, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau aktivitas.
- 2) *Output*, adalah tolak ukur kinerja menurut produk (jasa atau barang) yang diciptakan atau dihasilkan dari aktivitas maupun program.
- 3) *Outcome*, adalah tolak ukur kinerja menurut tingkat keberhasilan yang dapat diraih atas keluaran program atau aktivitas yang sudah dilaksanakan.
- 4) *Benefit*, adalah tolak ukur kinerja menurut tingkat kemanfaatan yang dapat dinikmati sebagai nilai tambah atau ekstra kepada pemerintah daerah dan masyarakat dari hasil.
- 5) *Impact*, adalah tolak ukur kinerja menurut dampak atau pengaruhnya terhadap kondisi makro yang ingin diraih dari manfaat.

Lebih diperjelas oleh Mardiasmo (2002) bahwa akuntabilitas disimpulkan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk menyerahkan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan semua kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang

mempunyai kewenangan dan hak untuk meminta atau memohon pertanggungjawaban tersebut.

b. Macam-Macam Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002), mengatakan bahwa akuntabilitas dibagi menjadi dua macam berikut :

1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal yaitu pertanggungjawaban berdasarkan pengelolaan dana kepada entitas yang lebih lanjut, misalnya pertanggungjawaban beberapa unit kerja kepada pemerintah daerah (PEMDA), pertanggungjawaban pemerintah daerah (PEMDA) kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada DPR.

2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban terhadap masyarakat secara keseluruhan.

c. Aspek-aspek Akuntabilitas

Menurut Tjokroamidjojo (2001) dalam Banga (2017) bahwa akuntabilitas terdiri atas beberapa aspek sebagai berikut:

1) Akuntabilitas mempunyai arti sebagai sebuah hubungan. Akuntabilitas merupakan komunikasi dua arah seperti yang sudah dijelaskan oleh *Auditor General of British Columbia*, yaitu sebuah kontrak yang terjadi antara 2 pihak.

- 2) Akuntabilitas mengarah atau berorientasi atas hasil. Pada struktur atau susunan organisasi sektor publik dan swasta saat ini, akuntabilitas tidak memandang kepada *input* ataupun *output*, melainkan kepada *outcome*.
- 3) Akuntabilitas memerlukan pelaporan. Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.
- 4) Akuntabilitas itu tidak ada arti dan nilainya tanpa adanya konsekuensi. Kata kunci utama yang digunakan didalam mendefinisikan dan mendiskusikan akuntabilitas adalah tanggungjawab.
- 5) Akuntabilitas meningkatkan kinerja. Tujuan dari akuntabilitas yaitu untuk meningkatkan atau memajukan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.

d. Indikator Akuntabilitas

Menurut Solihin (2007) dalam Banga (2017), indikator minimum terlaksananya akuntabilitas terdiri atas berikut ini :

- 1) Adanya kesesuaian atau kesamaan antara penerapan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- 2) Adanya sanksi, hukuman atau denda yang ditetapkan atau ditentukan atas kelalaian didalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

e. Perangkat Indikator Akuntabilitas

Perangkat indikator untuk mengukur akuntabilitas kinerja organisasi publik menurut Mardiasmo (2002) mencakup hal berikut:

- 1) Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan.
- 2) Adanya mekanisme pertanggungjawaban.
- 3) Adanya laporan tahunan.
- 4) Adanya laporan pertanggungjawaban periodic.
- 5) Adanya sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara.
- 6) Adanya sistem pengawasan.
- 7) Adanya mekanisme *reward and punishmen*.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomer 58 Thn 2005 pasal (1), menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berkaitan atas hak dan kewajiban daerah.

f. Tahap-Tahap Akuntabilitas

1) Perencanaan

Proses perencanaan merupakan tahapan yang cukup krusial mengingat pada tahap inilah perumusan kegiatan dan penganggaran dilakukan. Pihak-pihak yang bertanggungjawab, mulai dari sekretaris desa, kepala desa, BPD, camat dan bupati/walikota seyogyanya menyadari bahwa akuntabilitas harus dimulai sejak tahap ini. Akuntabilitas diwujudkan antara lain melalui pelibatan masyarakat (asas partisipatif-*red*) dalam proses perencanaan. Hal ini sangat penting

dilakukan untuk mendapatkan masukan berharga menyangkut prioritas kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam lingkup pemerintahan desa, terdapat dua jenis perencanaan yang harus disiapkan oleh kepala desa yaitu perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Rencana jangka menengah dalam lingkup desa dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang memiliki masa berlaku enam tahun. Sedangkan rencana jangka pendek yang merupakan *cascading* dari rencana jangka menengah dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang memiliki masa berlaku satu tahun. Rencana pembangunan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai serta strategi untuk mencapainya berfungsi sebagai acuan atau dasar bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 mengatur secara tegas bahwa setiap rencana penggunaan dana desa harus mengacu pada RPJMDes dan RKPDesa. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap rencana kegiatan dan penggunaan anggaran harus sejalan dan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah maupun rencana kerja tahunannya.

Untuk dapat menggunakan dana desa, terlebih dahulu kepala desa harus memiliki dokumen anggaran desa yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penyusunan APB Desa

dimulai dengan penyusunan Raperdes tentang APBDesa oleh sekretaris desa. Raperdes kemudian diajukan kepada kepala desa untuk disetujui dan dibahas dengan BPD. Setelah dibahas, Raperdes APBDesa kemudian ditetapkan menjadi Perdes dan diajukan kepada bupati/walikota melalui camat untuk dilakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan sesuai koreksi yang ada. Setelah diperbaiki, APBDesa telah sah menjadi dokumen yang menjadi dasar setiap pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan anggaran desa.

2) Pelaksanaan

Dalam pengelolaan keuangan desa, semua pihak yang bertanggungjawab harus memahami asas-asas yang wajib dijaga yaitu transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran. Tanggungjawab tertinggi berada pada pundak kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari :

- a) Sekretaris desa;
- b) Kepala seksi; dan
- c) Bendahara.

Masing-masing unsur tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai lingkup bidang dan kewenangannya. Sekretaris desa

bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Penyusunan semua dokumen perencanaan dan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi tugas utama seorang sekretaris desa. Oleh karena itu, seorang sekretaris desa haruslah memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, penatausahaan, pengendalian, dan pelaporan. Sebagai koordinator, sekretaris desa harus mampu menyusun sekaligus melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; menyusun Raperdes tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala seksi bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Seorang kepala seksi harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa; melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan; mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada

kepala desa; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara yang dijabat oleh staf pada urusan keuangan harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Beberapa hal yang perlu dijaga dalam pengelolaan keuangan desa agar tetap berjalan di atas asas-asas yang telah ditetapkan, antara lain bahwa:

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa,
- b) Semua penerimaan dan pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah,
- c) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa, kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, tidak dapat dilakukan sebelum Raperdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes,
- d) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB yang disahkan oleh kepala desa,
- e) Bendahara desa sebagai wapu wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa meliputi kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, penutupan buku dan penyusunan laporan pertanggungjawaban uang setiap bulan oleh bendahara desa kepada kepala desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan media buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

4) Pelaporan

Dalam menjaga akuntabilitas, kepala desa dapat memanfaatkan berbagai media yang ada, salah satunya melalui mekanisme pelaporan. Pelaporan menjadi media wajib yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan terkait pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana diatur dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, wajib menyampaikan:

- a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota,
- b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota,
- c) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut, pasal 37 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, kepala desa

sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa setiap semester wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.

5) Pertanggungjawaban

Akuntabel menjadi salah satu asas yang harus dipegang teguh oleh kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Hal ini berarti bahwa setiap kegiatan yang menggunakan anggaran desa harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) baik secara vertikal kepada pemberi tugas (pimpinan yang lebih tinggi-*red*) maupun secara horisontal kepada masyarakat. Sedangkan pasal 38 ayat 1 peraturan tersebut mengharuskan kepala desa setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Kompetensi Aparatur

a. Pengertian Kompetensi

Pengertian Kompetensi mulai muncul pada tahun 1596 oleh Webster's Dictionary. Pengertian ini berasal dari kata latin yaitu "*competere*" yang artinya "*to be suitable*". Selanjutnya menurut substansial mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya berbagai isu dan pengkajian

mengenai konsep kompetensi dari berbagai literatur. Menurut Peraturan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomer 46 A Tahun 2003 bahwa kompetensi adalah keahlian dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas posisinya, sehingga pegawai tersebut dapat melakukan kewajibannya secara efisien, efektif dan profesional.

Menurut Hutapea and Thoha (2008) dalam Moeheriono (2018) mengatakan bahwa kompetensi adalah keahlian dan tekad dalam melaksanakan kewajibannya dengan kemampuan yang realitis dan praktis untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Spencer dalam Moeheriono (2018) menjelaskan kompetensi adalah keistimewaan yang menjadi dasar awal seseorang berhubungan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang dimiliki sebagai sebab akibat dengan standar yang dijadikan tolak ukur dalam berkinerja secara prima ditempat kerja atau pada situasi tertentu.

Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan persiapan. Salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia (Widyatama & Novita, 2017).

b. Maksud dan Tujuan Kompetensi

Kompetensi terletak pada elemen setiap manusia dan selalu ada pada karakter seseorang yang dapat menggambarkan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan (job tasks) (Spencer dalam (Moeheriono, 2018). Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa maksud dan tujuan yang tercantum didalamnya, yaitu:

- 6) Karakteristik dasar (*underlying characteristic*) berarti kompetensi merupakan bagian dari karakter yang mendasar pada diri seseorang dan memiliki perilaku yang dapat diperhitungkan didalam berbagai tugas atau pekerjaan.
- 7) Hubungan Kausal (*causally related*) artinya kompetensi dapat digunakan untuk memperkirakan kinerja atau kemampuan seseorang, artinya jika memiliki kompetensi yang bagus, maka akan memiliki pula kinerja yang bagus.
- 8) Kriteria Referansi (*criterion referenced*) yang menjadi tolak ukur kompetensi secara nyata dan dapat menggambarkan seseorang mampu bekerja secara baik, terukur dan spesifik (terstandar).

c. Karakteristik Kompetensi

Menurut Moeheriono (2018) menjelaskan dalam setiap individu mempunyai beberapa karakteristik kompetensi yang paling dasar, antara lain :

- 1) Watak (*traits*), yaitu sifat dasar yang membuat seseorang mempunyai sikap dan perilaku yang dapat merespon sesuatu dengan caranya

masing-masing misalnya percaya diri (*confidence*), kontrol diri (*self control*), ketabahan atau daya tahan (*durability*).

- 2) Motif (*motive*), yaitu sesuatu yang dipikir dan diinginkan oleh seseorang yang dapat menimbulkan suatu tindakan dari dalam diri yang bersangkutan untuk melakukan suatu kegiatan.
- 3) Bawaan (*self concept*), yaitu tingkah laku dan kepribadian dasar didalam diri seseorang.
- 4) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu sebuah informasi yang dimiliki oleh seseorang disuatu bidang atau area tertentu.
- 5) Keahlian (*skill*), yaitu kemampuan dalam mengerjakan tugas baik dalam bentuk fisik maupun mental.

d. Kategori Kompetensi

Menurut Wibowo (2010:330) dalam Hartanto (2017), ada beberapa tipe kompetensi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Task Achievement

Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja yang baik. Kompetensi yang berkaitan dengan ini ditunjukkan pada orientasi hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi inisiatif, efisiensi dan keahlian teknis.

2) Relationship

Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan

kebutuhannya. Kompetensi ini meliputi kerja sama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, perhatian pada komunikasi.

3) Personal Attribute

Merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berfikir, merasa, belajar dan berkembang. Kompetensi ini meliputi kejujuran dan integritas, ketegasan, pengembangan diri, kualitas keputusan, berfikir analitis dan berfikir konseptual.

4) Managerial

Merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial berupaya untuk memotivasi, memberdayakan dan mengembangkan orang lain.

5) Leadership

Merupakan kompetensi yang berhubungan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi dan tujuan organisasi. Kompetensi ini meliputi kepemimpinan visioner, berfikir strategi, orientasi kewirausahaan, dasar-dasar dan nilai-nilai.

e. Tipe Kompetensi

Menurut Wibowo (2010:328), ada beberapa tipe kompetensi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Planning Competency

Dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

2) Influence Competency

Dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju organisasional.

3) Communication Competency

Bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.

4) Interpersonal Competency

Meliputi empati, membangun konsensus, networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik dan menghargai orang lain.

5) Thinking Competency

Berkenaan dengan berfikir strategis, berfikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.

6) Organizational Competency

Meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.

f. Jenis-Jenis Kompetensi

Menurut Moeheriono (2018) ada 3 jenis kompetensi yang dimiliki

oleh Sumber Daya Manusia, antara lain :

1) Kompetensi Individu

Kompetensi individu adalah keahlian kerja yang melekat pada seseorang yang dapat menghubungkan keterampilan, pengetahuan dan sikap berdasarkan pembelajaran dan pengalaman dalam upaya pelaksanaan tugas secara professional, efektif dan efisien. Dalam kompetensi individu ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu terdiri atas kompetensi *threshold* atau dapat disebut juga dengan kompetensi minimum yaitu kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seseorang, misalnya penguasaan pengetahuan atau kemampuan dasar seperti kemampuan / kemahiran membaca dan menulis, dan kompetensi *differentiating* yaitu kompetensi yang berguna agar bisa membedakan antara seseorang yang berkinerja tinggi atau berkinerja rendah antara yang satu dengan karyawan lainnya, misalnya seseorang yang mempunyai motivasi tinggi umumnya yang sering diperhatikan adalah pada tujuan melebihi apa yang ditargetkan oleh perusahaan didalam standar kerja. Kompetensi ini dapat direfensikan sebagai “ketrampilan yang dapat menyesuaikan situasi” atau *starting qualification*, yang isinya adalah keterampilan sosial dan komunikasi, teknik umum dan situasi berubah-ubah, kualitas organisasional serta pendekatan dasar pekerjaan dan situasi.

2) Kompetensi Jabatan

Kompetensi jabatan (*job competency*), memiliki fungsi yang sangat

berpengaruh dan harus mendapat perhatian khusus dari pihak manajemen karena aspek kompetensi jabatan sudah banyak dipakai sebagai dasar penentu posisi jabatan calon karyawan. Seseorang agar bisa mencapai kinerja tinggi secara maksimal semestinya antara kompetensi individu yang dimiliki harus sesuai dengan kompetensi jabatan yang diembannya, hal ini akan terjadi kecocokan (*matching*) dan kesesuaian dengan kemampuan yang dimilikinya. Moehariono (2014) mengatakan berdasarkan standar kompetensi didalam kompetensi jabatan, terdapat dua komponen dasar, yaitu kompetensi pendukung dan kompetensi utama, rinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Kompetensi yang wajib dimiliki oleh seseorang yang berhubungan dengan suatu jabatan pekerjaan pada ruang lingkup tertentu, agar penerapan jabatan tersebut berhasil dengan baik, maka harus meliputi

(1) Akuntabilitas

Menyusun pertanggungjawaban kinerja organisasi secara khusus yang meliputi perkembangan kinerja organisasi sesuai tujuan, pengukuran dan pelaporan, yaitu meliputi:

- (a) Mengembangkan sistem *data base*,
- (b) Menyusun laporan kinerja organisasi secara periodik,
- (c) Mengarahkan seluruh anggota organisasi untuk mewujudkan kinerja individu dan kinerja organisasi

(2) Organisasi pembelajaran

Menumbuhkan dan mengembangkan iklim organisasi dan komitmen seluruh individu, yaitu meliputi:

- (a) Mengembangkan dan memahami penempatan seluruh pimpinan dan staf karyawan sebagai salah satu tim serta sebagai kolega (bukan sebagai hubungan atasan-bawahan),
 - (b) Menumbuhkan dan mengembangkan iklim organisasi untuk mendorong inovasi.
- (3) Menentukan masalah dan memecahkannya

Menyiapkan dan mengambil keputusan, memecahkan masalah berdasarkan data yang valid melalui analisis dari berbagai aspek (*system thinking*), yaitu meliputi:

- (a) Mendelegasikan wewenang kepada bawahan secara proporsional.
- (b) Mengelola manajemen sumber daya manusia secara optimal,
- (c) Mengembangkan kebijakan internal pola karier karyawan (*competency-based appointment and rotation policy*).
- (d) Mengembangkan kebijakan internal dan mengembangkan sumber daya karyawan,
- (e) Mengembangkan kebijakan internal dan penilaian kinerja karyawan
- (f) Mengembangkan kebijakan internal dan mendorong

pencapaian kinerja tinggi.

(4) Manajemen perubahan

Membuka diri (*openness to change*) menerima dan melakukan perubahan, yaitu meliputi:

- (a) Mengembangkan iklim organisasi kepada semua pimpinan dan karyawan untuk melakukan perubahan lebih baik,
- (b) Melakukan kajian aspek konsep maupun praktik dalam rangka mewujudkan kinerja yang tinggi,
- (c) Melakukan perubahan sejalan dengan perkembangan administrasi dan manajemen,

(5) Perencanaan strategik

Mengembangkan visi bersama (*shared vision*) secara terus-menerus sebagai komitmen bersama, yaitu meliputi:

- (a) Melakukan analisis secara komprehensif terhadap komitmen internal dan komitmen eksternal perusahaan,
- (b) Melakukan analisis secara komprehensif terhadap isu-isu strategik secara periodik,
- (c) Melakukan peninjauan ulang secara periodik terhadap rencana strategik.

(6) Manajemen kebijakan

Melakukan kebijakan-kebijakan dengan kegiatan, yaitu meliputi:

- (a) Mengidentifikasi perlunya kebijakan regional dan nasional,
 - (b) Mengacu pada tugas pokok dan fungsi misi organisasi,
 - (c) Mengarahkan dan mengimplementasikan kebijakan organisasi,
 - (d) Melakukan evaluasi kebijakan secara kontinu.
- (7) Manajemen kinerja (*management for result*)

Melakukan perencanaan kinerja (*performance planning*) sesuai rencana strategik, yaitu meliputi:

- (a) Menetapkan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja organisasi,
 - (b) Menetapkan anggaran berdasarkan kinerja organisasi,
 - (c) Mengembangkan mekanisme pemantauan dan pengendalian,
 - (d) Melakukan evaluasi kinerja organisasi secara periodik.
- (8) Manajemen kualitas pelayanan

Mengembangkan iklim dan budaya organisasi pada kualitas pelayanan, yaitu meliputi:

- (a) Melakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan (*service re-engineering*),
- (b) Menyusun standar pelayanan (*service standart*),
- (c) Mengembangkan pola mekanisme penilaian terhadap kualitas pelayanan (*quality standart*),

- (d) Melakukan pengukuran kualitas pelayanan (*services quality*).

(9) Manajemen kerjasama

Mengembangkan pola kerja sama atau aliansi strategik terhadap internal maupun eksternal organisasi, yaitu meliputi:

- (a) Melakukan analisis internal tingkat kebutuhan dan manfaat kebutuhan,
- (b) Mengarahkan perencanaan dan penjajagan kerjasama,
- (c) Melakukan negosiasi untuk menghasilkan secara maksimal,
- (d) Membentuk dan mengarahkan tim internal organisasi untuk pengelolaan operasional,
- (e) Melakukan evaluasi terhadap kerjasama.

- b) Kompetensi pendukung merupakan kompetensi yang diperlukan untuk menunjang dan mendukung terlaksananya pelaksanaan jabatan tertentu, yang terdiri atas :

(1) Komunikasi

- (a) Mengembangkan pola komunikasi formal dan informal baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam unit organisasi,
- (b) Mengembangkan pola mekanisme penyebaran informasi dalam internal organisasi,
- (c) Mengembangkan pola dan mekanisme komunikasi

eksternal organisasi,

(d) Menyajikan dan mempresentasikan pemikiran konsep kebijakan.

(2) Teknologi informasi

Memanfaatkannya informasi teknologi untuk menunjang tugas dan tanggung jawab pekerjaan, yaitu meliputi mengembangkan iklim organisasi yang mendorong pimpinan dan karyawan untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya.

3) Kompetensi Organisasi

Organisasi tidak diragukan lagi karena salah satu komponen yang sangat berpengaruh dan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi terletak pada komponen sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu, pengendalian sumber daya manusia harus dilakukan secara komprehensif dan cermat dalam konteks sistem pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat vital, terintegrasi dan selalu terhubung, sesuai tujuan dan visi misi di dalam organisasi. Tindakan yang perlu dilakukan oleh organisasi supaya sanggup menjawab tantangan zaman yang selalu mengalami suatu perubahan dari hari ke hari, baik perubahan dari dalam (internal) maupun perubahan dari luar (eksternal) misalnya penggunaan teknologi informasi. Namun, untuk menjalankan perubahan tersebut secara baik dan aman, komponen organisasi tidak hanya sekedar meniru atau mampu menambah perhatian pada nilai-nilai (*value*)

tujuan organisasi mereka sendiri. Oleh karena itu, kompetensi inti organisasi perlu dikembangkan oleh semua elemen dan anggota organisasi agar berkelanjutan dan berkesinambungan (*sustainable*).

Untuk mempunyai kompetensi yang intensif dan ekstensif, hendaknya organisasi bergantung pada kerangka visi organisasi itu sendiri (*organization vision framework*), karena hal ini merupakan sebuah *core ideology* yang terdiri atas *core value* dan *competence* di masa yang akan datang, yang menjadi harapan bagi organisasi. Maka, tanpa adanya *value* dan *core competence*, organisasi tidak akan tumbuh berkembang dengan subur pada tujuan yang telah dibuat sejak awal. *Core competence* pada setiap organisasi sebaiknya mempunyai ciri khusus bagi organisasi itu sendiri. *Core competence* tersebut hendaknya digunakan secara efektif, maka dipastikan harus dapat menjawab tantangan dari para kompetitornya, yang disebut keunggulan bersaing atau *competitive advantage*.

Kepercayaan yang dibangun antar karyawan maupun antar karyawan dengan pihak manajemen juga merupakan komponen kunci lain yang memungkinkan terlaksananya mekanisme pembelajaran kompetensi. Adanya rasa saling percaya akan menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri masing-masing karyawan. Kepercayaan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Selanjutnya kepercayaan tersebut dapat bertambah akibat adanya sistem manajerial yang terdiri dari upah/hadiah, pelatihan atau

pendidikan, sistem dan kebijakan.

4. Partispasi Masyarakat

a. Pengertian Partispasi Masyarakat

Secara umum, partisipasi berawal dari bahasa Inggris yaitu *participation* yang artinya peran serta. Dalam penjelasan yang lebih luas, partisipasi dapat diistilahkan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan (Solekhan, 2014). Sumarto dalam Sembodo (2006) menyatakan bahwa partisipasi adalah suatu prosedur yang mengizinkan adanya interaksi atau hubungan yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberative, tersedianya ruang untuk mendengarkan, belajar, reflektasi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.

Partispasi merupakan segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena jarak yang lebih dekat antara pemerintah dan warga masyarakat dapat membuat pejabat publik dan pemerintah lebih bertanggung jawab (Mada et al., 2017).

Selain itu, masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap lembaga pemerintahan. Akuntabilitas untuk masyarakat sebaiknya

sejalan dengan adanya sarana akses yang sama bagi semua masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Akses ini perlu disediakan oleh pemerintah, agar seluruh masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menggunakan akses tersebut.

b. Tujuan Partisipasi Masyarakat

Salah satu tujuan terpenting partisipasi masyarakat yang tidak bisa terlepas dalam setiap kegiatan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanoff (2000) dalam Solekhan (2014) bahwa tujuan utama partisipasi yaitu :

- 1) Mengimplikasikan masyarakat dalam mekanisme pengambilan keputusan.
- 2) Menyampaikan hak suara masyarakat dalam mekanisme pengambilan keputusan,
- 3) mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

Kemudian, untuk menjamin adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada konteks sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat

c. Manfaat Partisipasi Masyarakat

Menurut USAID (2007) dalam Solekhan (2014) bahwa ada 4 potensi manfaat yang diharapkan dari penerapan partisipasi masyarakat ini, yaitu:

- 1) Partisipasi dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan daerah yang penting seperti perencanaan dan alokasi anggaran.

- 2) Perlibatan warga dan organisasi warga dalam tata pemerintahan menjadi sumber munculnya pendekatan-pendekatan dan program pengembangan yang lebih inventif dan inovatif.
- 3) Keterlibatan aktif kelompok marginal berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang bersifat afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat deskrimiatif.
- 4) Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi potensi konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.

Bertitik tolak dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi itu merupakan keikutsertaan atau keterlibatan secara sadar dan sukarela untuk berkontribusi secara fisik maupun non fisik dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan. Jika diperinci, pengertian partisipasi tersebut mengandung unsur :

- 1) Keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan,
- 2) Kesadaran akan sukarela,
- 3) Adanya sikap pro aktif,
- 4) Adanya kontribusi yang diberikan, baik secara fisik maupun non-fisik, dan
- 5) Adanya kesepakatan-kesepakatan.

Dengan demikian, prinsip partisipasi masyarakat itu menuntut adanya pemberdayaan, pemberian ruang publik, akses kesempatan dan

keikutsertaan dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil.

d. Aspek Responsibilitas dalam Partisipasi

Responsibilitas (*responsibility*) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh para pegawai publik dalam menjalankan tugasnya. Para pegawai publik dikatakan responsibel jika memiliki standar profesionalisme yang tinggi ((Widodo, 2001) dalam (Solekhan, 2014)). Mengacu pada pengertian itu, maka pegawai publik yang profesional akan selalu terdorong untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh rasa tanggungjawab. Tanggungjawab tersebut diarahkan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa para pegawai publik dikatakan responsibel jika mereka selalu terdorong untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin dalam kondisi apapun.

Sedangkan sikap responsif (*responsiveness*) akan dapat terlihat sejauh mana para pegawai tanggap terhadap apa yang menjadi permasalahan, harapan, keluhan dan kebutuhan masyarakat. Menurut Hughes (1994) dalam (Solekhan, 2014) menyatakan bahwa responsif dari para pegawai bisa menjalin komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi antara pegawai publik dengan masyarakat akan memungkinkan para pegawai publik untuk lebih bisa mengenali tentang apa yang menjadi harapan, kebutuhan dan keluhan masyarakat. Dengan demikian, para pegawai

publik bisa mewujudkan layanan publik yang berkualitas jika mereka mampu menjalin komunikasi yang efektif kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan partisipatif.

Banyak media partisipatif yang bisa dipergunakan oleh para pegawai publik dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat, misalnya layanan website dan mobile untuk memberikan informasi dan menanggapi berbagai aspirasi masyarakat secara dinamis. Teknik partisipasi lainnya bisa dilakukan melalui kegiatan cangkrukan. Dimana, kegiatan semacam ini merupakan media untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan informasi publik. Bisa juga dilaksanakan konferensi warga untuk mendiskusikan tentang pengembangan sumberdaya manusia ((Sobari, 2010) dalam (Solekhan, 2014).

Dengan demikian jelaslah bahwa antara partisipasi dan responsibilitas publik memiliki keterkaitan. Responsibilitas publik akan dapat dilihat dari sejauh mana para pegawai publik berkenan untuk menjalin komunikasi dengan msyarakat, agar mereka dapat melihat, merasakan, dan mendengarkan tentang apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Dimana, media dan teknik yang dipergunakan dalam menjalin komunikasi dengan msyarakat tersebut menggunakan pendekatan partisipatif. Kesiadaan para pegawai publik untuk membuka pintu lebar-lebar guna mnjalin komunikasi dengan masyarakat inilah yang pada gilirannya akan dapat menentukan derajat responsibilitas mereka. Semakin baik komunikasi yang terjalin akan memungkinkan

para pegawai publik untuk bersikap responsibel dengan masyarakat, dan hal itu berarti akan memungkinkan mereka untuk lebih bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan masyarakat kepadanya.

e. Akuntabilitas Sebagai Prasyarat dalam Partisipasi

Lembaga pemerintahan sesungguhnya dibuat dan diadakan oleh publik (masyarakat). Oleh karena itu, para pegawai dalam lembaga pemerintahan juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pegawai lembaga pemerintahan adalah mencakup semua perilaku, sikap, tindakan kerja dan berbagai keputusan yang dibuat dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh publik. Menurut Prianto (2006) dalam (Solekhan, 2014) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Karena itu, para pegawai lembaga pemerintahan dikatakan akuntabel jika mereka dapat mempertanggungjawabkan segala perilaku, sikap dan tindakan kerjanya sesuai dengan yang diinginkan oleh publik.

Dalam kaitanya dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat memiliki tanggungjawab untuk melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintah. Akuntabilitas untuk masyarakat tersebut seharusnya dibarengi dengan adanya akses yang sama bagi

seluruh masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Jika akses dan saluran ini diberikan oleh pemerintah, maka saran tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dan melakukan kontrol. Akses dan saluran ini perlu diadakan oleh pemerintah, agar semua kelompok masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan saluran tersebut.

Oleh karena itu, upaya membangkitkan partisipasi masyarakat bisa dilakukan jika pemerintah membuat dan menetapkan saluran atau akses bagi masyarakat untuk berperan serta. Perlu diingat juga, bahwa suatu obyek pembangunan itu diadakan adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pejabat pemerintah. Karenanya, masyarakat harus dilibatkan dalam proyek pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil. Keterlibatan masyarakat semacam ini, pada gilirannya nanti akan dapat mengurangi penyimpangan, korupsi dan tindakan-tindakan kesewenangan dari lembaga publik. Hal inilah yang disebut akuntabilitas, amanah dan sekaligus melaksanakan partisipasi masyarakat.

f. Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat

Menurut Pangestu (1995) dalam Rismawati (2019), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

- 1) Faktor internal mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan,

jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.

- 2) Faktor eksternal meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran. maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.

Menurut Solekhan (2014), Selain itu ada juga faktor pendukung partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

a) Peran Tokoh Masyarakat, Terutama Tokoh Agama

Para tokoh masyarakat, terutama para tokoh agama disini memiliki pengaruh yang sangat tinggi karena mereka banyak berinteraksi dengan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial-keagamaan. Apa yang disampaikan oleh para tokoh agama tersebut cenderung mudah diterima karena mereka sering memberikan ceramah membantu mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan memiliki pemahaman nilai-nilai keagamaan yang lebih sehingga para tokoh agama tersebut dipandang sebagai panutan masyarakat.

Karena itu kedudukan para tokoh tersebut memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat dan sangat

berpengaruh pula dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan di desa jika peran tokoh agama tersebut bisa bersinergi dengan pemerintah maka praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

b) Budaya gotong-royong masyarakat yang tinggi

Masyarakat Indonesia masih memiliki tradisi atau budaya gotong royong yang sangat tinggi Hal ini terlihat pada kegiatan kegiatan pembangunan rumah tempat-tempat peribadatan sarana prasarana seperti pelantaran pembuatan saluran air perbaikan jalan dan kegiatan kegiatan warga yang lainnya dengan demikian jelas bahwa gotong royong masyarakat yang termasuk dalam proses pembangunan.

g. Prinsip Dasar Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Sangat disadari bahwa pengembangan partisipasi masyarakat itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh yang menyebabkan formalisasi partisipasi menjadi sangat bervariasi satu dengan lainnya. Artinya, tidak ada satu formalisasi yang baku tentang konsep partisipasi. Menurut Solekhan (2014), pengertian partisipasi itu mengandung sesuatu yang bergerak dinamis dalam suatu proses perkembangan. Akan tetapi dalam pengembangan partisipasi masyarakat itu setidaknya-tidaknya ada beberapa prinsip dasar pengembangan partisipasi masyarakat tersebut, diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Kebersamaan

Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Perlembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen, baik struktural maupun kultural, secara vertikal maupun horizontal. Partisipasi tumbuh melalui konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasian dan pengendalian dalam penyelenggara suatu kegiatan.

2) Tumbuh dari bawah

Partisipasi itu bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah (*top down*) atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi itu tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, prakarsa dan inisiatif harus muncul dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, partisipasi itu merupakan suatu proses pelembagaan yang bersifat *bottom-up*, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan penyelenggaraan suatu kegiatan.

3) Kepercayaan dan Keterbukaan

Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi bergerak, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat.

h. Strategi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa

Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas dari pemerintah desa untuk melakukan integrasi dan aksi bersama dengan masyarakat. Untuk itu, dirasakan urgensinya mencari alat dan pendekatan baru serta teknik-teknik partisipasi. Lebih daripada itu, keterbukaan pemerintah desa menjadi prasyarat yang tidak bisa ditawar. Pemimpin yang memiliki visi dan terbuka terhadap inovasi dan perubahan akan mendorong dihasilkannya kebijakan yang pro-partisipasi dan mendorong terinterinstitutionalisasinya metode-metode partisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Disamping itu, Sumber Daya Manusia (seperti: organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi kewanitaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya) perlu untuk membenahi kemampuannya dalam membantu warga masyarakat untuk mengorganisir diri dan mengemukakan aspirasinya. Hilangnya kepercayaan warga terhadap pemerintah, dan tererosinya komitmen warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa

merupakan tantangan yang cukup berat saat ini. Padahal salah satu pendorong terciptanya *good governance* adalah keberadaan institusi masyarakat yang kuat, yang dicirikan dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis organisasi dan asosiasi yang memiliki kemampuan dan bersedia untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Banyaknya permasalahan dan kegagalan pembangunan disebabkan kurang adanya keterlibatan masyarakat. Menurut Kartasasmita (1997) mengatakan bahwa kegagalan di masyarakat dikarenakan tidak adanya partisipasi dari masyarakat. Kenyataan tersebut menjadikan pertimbangan bahwa partisipasi hendaknya ditumbuhkan untuk mencapai keberhasilan.

Terkait dengan upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat tersebut, Talizuduhu (1990) dalam Solekhan (2014) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat itu dapat ditumbuhkan atau digerakkan melalui beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Perbaikan kondisi hidup masyarakat disesuaikan dengan keinginan masyarakat yang nyata (*felt need*).
- 2) Perbaikan kondisi hidup masyarakat dijadikan stimulan terhadap masyarakat yang berfungsi sebagai pendorong timbulnya jawaban (*respons*) yang dikehendaki.

- 3) Perbaikan kondisi hidup masyarakat dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi menghidupkan kembali tingkah laku yang dikehendaki berlanjut.
- 4) Proyek pembangunan yang telah disediakan secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
- 5) Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang dapat menggerakkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
- 6) Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

Selanjutnya, Soetrisno (1995) dalam Solekhan (2014) menjelaskan bahwa untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan adanya sikap toleran dari aparat pemerintah dalam menerima kritik dan pikiran alternatif yang muncul dari masyarakat tersebut sebagai akibat dari dinamika pembangunan itu sendiri. Mengingat, kritik dan pikiran alternatif merupakan satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penting untuk diingat bahwa antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang sangat erat. Kesediaan masyarakat masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu sendiri untuk berkembang secara percaya diri (*self confident*), rasa pengakuan diri (*self respect*) dan mandiri (*self reiance*). Sebagaimana diungkapkan oleh Mubyarto (1984) dalam Solekhan (2014) mengatakan bahwa kemampuan masyarakat untuk berkembang secara

mandiri berkorelasi dengan kemampuannya untuk berpartisipasi dan juga dengan kemampuannya untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri.

Penumbuhan partisipasi masyarakat memerlukan kesungguhan dan konsistensi dari semua pihak, mengingat hal ini harus dilakukan secara terus-menerus dan membutuhkan rentang waktu yang cukup lama bahkan tidak terbatas. Mengingat penumbuhan partisipasi itu harus dimulai dari rasa saling percaya dan sikap solider, baik anatar individu dalam masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Sebagaimana diungkapkan oleh Maskun (1994) dalam Solekhan (2014) bahwa partisipasi masyarakat itu merupakan suatu *partnership system* dalam membangun masyarakat desa. Tidak mustahil pertumbuhannya tersebut akan memakan waktu relatif lama walaupun dengan usaha yang terus-menerus, realistis dan sungguh-sungguh.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pengertian Teknologi Informasi

Menurut Haag & Keen (1996) dalam Murhada & Giap (2011) menjelaskan teknologi informasi adalah sebuah alat atau perangkat yang menunjang pekerjaan dengan menggunakan informasi dan mengerjakan tugas atau kewajiban yang berkaitan atau berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan

data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia.

Menurut Martin (1999) dalam Murhada & Giap (2011), teknologi informasi yang digunakan dalam menyimpan dan memproses informasi bukan hanya sebatas pada teknologi komputer (*hardware dan software*) saja tetapi mencakup juga teknologi komunikasi untuk mengirim/menyebarkan informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

b. Peranan Teknologi Informasi di dalam bidang Pemerintahan

Hampir disetiap perkantoran maupun dinas atau instansi pemerintah sudah menggunakan komputer. Penggunaannya umumnya untuk pelayanan masyarakat (*public service*), menyusun dan pengarsipan data penduduk, mengolah data pada administrasi tata usaha, statistika, perencanaan, pengambilan keputusan, dan lain-lain (Murhada & Giap, 2011).

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi yang bisa meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak lainnya. Penggunaan teknologi informasi dapat menciptakan hubungan bentuk yang baru misalnya : G2B (*Government to Business*), G2C (*Government to Citizen*) dan G2G (*Government to Government*). Apalagi sekarang dengan melalui

e-government, komputer mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dan berguna bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi beragam kebijakan, mempromosikan potensi wilayah dan pariwisata, dan sebagainya, melaksanakan pemberdayaan masyarakat seperti kerjasama yang dilakukan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat.

Sepertinya teknologi informasi dimasa yang akan datang bakal digunakan sebagai pengambilan keputusan politik, misalnya untuk pemelihan umum yang merupakan konsep atau rancangan yang sudah dilaksanakan di berbagai Negara maju. Selain itu masyarakat dapat menyalurkan aspirasi atau pendapat secara langsung kepada para legislative dan eksekutif pemerintah melalui sebuah e-mail atau forum elektronik pada web yang dibangun pemerintah setempat.

c. Manfaat *E-Government*

Manfaat *e-government* yang dapat dinikmati oleh masyarakat antara lain:

1) Fasilitas pelayanan yang baik bagi masyarakat

Informasi dan keterangan sudah disediakan pelayanan 24 jam sehari dan dapat dicari dimanapun tempatnya tanpa harus menunggu dibukanya kantor pelayanan pemerintah.

2) Meningkatkan hubungan atau interaksi antara pelaku bisnis, pemerintah dan masyarakat

Tersedianya keterbukaan untuk itu diharapkan hubungan atau interaksi antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini dapat menghilangkan kekesalan dan saling curiga dari semua pihak.

- 3) Memberdayakan masyarakat melalui sebuah informasi yang mudah didapat

Dengan tersedianya informasi yang memadai, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang fakultas: nomer induk mahasiswa, daya tampung fakultas, IPK, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online.

- 4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien

Misalnya koordinasi dipemerintahan dapat dilakukan melalui surat elektronik (*email*) atau video conference. Bagi Indonesia yang mempunyai luas area wilayah yang sangat besar, hal seperti ini sangat membantu. Seperti tanya jawab, berkoordinasi dan diskusi antar pimpinan daerah dapat dilaksanakan tanpa kesemuanya harus hadir dilokasi fisik yang sama.

6. Dana Desa

Dana desa menurut UU No. 60 Tahun 2014 merupakan dana yang berasal dari APBN dan dikhususkan bagi desa kemudian disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dengan cara pemindahan buku dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan selanjutnya ke Rekening Kas Desa (RKDesa). Dana desa dipakai untuk membiayai pelaksanaan

pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, menyetorkan/membayar, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Pemerintah menyalurkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa tersebut berasal dari belanja pemerintah beserta mengefektifkan program berbasis desa secara adil dan merata. Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 yaitu program dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban desa berdasarkan atas hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. PP No. 22 Tahun 2015 juga menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam Pasal 11, yang mana dana desa setiap kabupaten/kota dihitung menurut jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis dan angka kemiskinan desa di setiap kabupaten/kota.

Dana desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara taat dan tertib pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, bertanggungjawab dan transparan dengan memperhatikan rasa kepatuhan dan keadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Penyaluran dana desa dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: tahap I pada bulan April sebesar 40%; tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (Yuliansyah & Rusmianto, 2015).

PP No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

7. Pengelola Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat

berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud.

a. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Chabib Sholeh dan Heru Rochansjah (2014), untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah:

- 1) Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
- 2) Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
- 3) Asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
- 4) Asas spesialisitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- 5) Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 6) Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
- 7) Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- 9) Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
- 10) Asas *value for money* yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- 11) Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.

- 12) Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) sehingga jika terjadi selisih dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
- 13) Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandate untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 15) Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
- 16) Asas kepatuhan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
- 17) Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelola keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana desa yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluaranya.

Kemudian secara ekonomis maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. Sedangkan secara berkeadilan maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

b. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa kekuasaan atau otoritas pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) (Kementrian Dalam Negeri, 2014). Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan atau otoritas dalam pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dibedakan atau dipisahkan (Yuliansyah & Rusmianto, 2015). Oleh karena itu, menurut Solekhan (2014) mengatakan bahwa kepala desa memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UU NOMOR 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan sebagai berikut :

1) Tugas Kepala Desa

Terkait dengan tugas Kepala Desa, pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa kepala desa desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2) Wewenang Kepala Desa

Terkait dengan tugas Kepala Desa, pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa wewenang Kepala Desa dalam mengelola dana desa adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan kebijakan atau peraturan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b) Menentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d) Menyepakati pengeluaran atau biaya berdasarkan kegiatan yang ditentukan dalam APBDesa.
- e) Melaksanakan tindakan atau aktivitas yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dibantu atau didukung oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari elemen perangkat desa yang ditentukan oleh keputusan kepala desa. Elemen perangkat desa tersebut terdiri dari:

1) Sekretaris Desa

Sekretaris desa berperan selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas:

- a) Menyusun melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- b) Menyusun rancangan peraturan desa terhadap APBDesa, perubahan APBDesa, dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- c) Melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang telah ditentukan dalam APBDesa.
- d) Menyusun pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBDesa
- e) Melaksanakan verifikasi atas bukti dalam penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

2) Kepala Seksi

Kepala seksi berperan sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, dengan tugas:

- a) Membentuk rencana pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang menjadi kewajibannya.
- b) Melaksanakan kegiatan bersama dengan lembaga kemasyarakatan desa yang sudah ditentukan dalam APBDesa.
- c) Melaksanakan tindakan atau aktivitas pengeluaran yang mengakibatkan atas beban anggaran belanja kegiatan.

- d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- e) Melaporkan atau menyampaikan perkembangan atas pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
- f) Menyiapkan dokumen anggaran terhadap beban pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan.

3) Bendahara

Bendahara dipegang oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara memiliki tugas-tugas seperti menyimpan, menerima, menatausahakan, menyetorkan/membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan dalam pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan penelitian saat ini menggunakan 12 (dua belas) penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Atiningsih & Ningtyas, 2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas

Dilanjutkan

Lanjutan

		Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)	Pengelolaan Dana Desa pada Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali
2	(Widyatama & Novita, 2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan tidak memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD). Sistem Pengendalian Aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan lokasi Dana Desa (ADD)
3	(Aziiz, 2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kompetensi Aparat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Dilanjutkan

Lanjutan

4	(Nurkhasanah, 2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Penganggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sementara itu, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan, tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
5	(Karyadi, 2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Secara simultan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa
6	(Umairah & Adnan, 2019)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan berpengaruh positif

Dilanjutkan

Lanjutan

		Kabupaten Aceh Barat Daya)	terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
7	(Wahyuni et al., 2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Aparat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
8	(Agus Suma Arta & Rasmini, 2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
9	(Supadmi & Suputra, 2018)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sararan Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar
10	(Sapartiningsih et al., 2018)	Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Ada pengaruh yang positif dan signifikan Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Dilanjutkan

Lanjutan

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen
11	(Mada et al., 2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kompetensi aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo
12	(Masruhin & Kaukab, 2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kompetensi aparatur, Komitmen organisasi, Partisipasi masyarakat dan Kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Dari tabel studi penelitian terdahulu tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Dalam penelitian Atiningsih & Ningtyas (2019) menggunakan variabel independen

Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal. Sedangkan pada penelitian Widyatama & Novita (2017) menggunakan variabel independen Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal. Dan pada penelitian Aziiz (2019) menggunakan variabel independen Kompetensi Aparat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti menggabungkan dari ketiga variabel independen tersebut yaitu Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Selain itu perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada tahun, sampel dan objek penelitian. Objek penelitian ini dilaksanakan pada Desa di Kecamatan Tarub pada tahun 2020.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2016). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kompetensi aparatur pengelola dana desa merupakan suatu keahlian mutlak yang diperlukan aparatur desa agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong

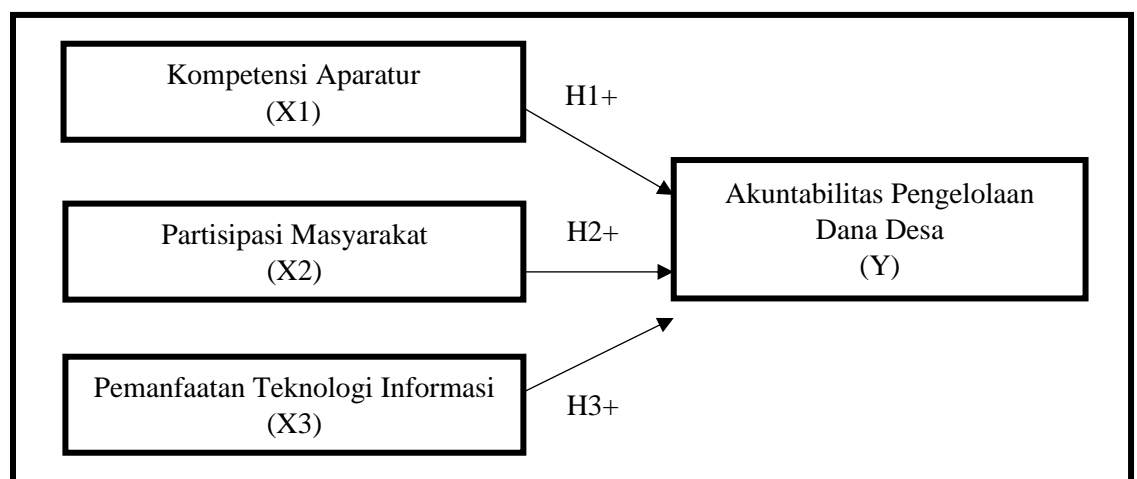
pembangunan desa yang optimal. Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Kompetensi berhubungan dengan sikap, watak kepribadian dan pengetahuan yang diperolehnya. Kemampuan atau kompetensi seseorang termasuk dalam kategori tinggi atau baik nantinya akan dibuktikan dan ditunjukkan, Apabila ia sudah melakukan pekerjaan (sudah bekerja). Sebaliknya, apabila mempunyai kompetensi tingkat rendah ia akan cenderung berkinerja rendah pula.

Partisipasi Masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara *monitoring cost*. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dapat

meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik nantinya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan cara proses penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah desa yang lebih cepat, akurat, dan tepat sehingga mengurangi kesalahan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini:



Sumber : Dari berbagai jurnal serta dikembangkan untuk penelitian

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016), hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Berdasarkan teori dan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1: Terdapat pengaruh positif Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

H2: Terdapat pengaruh positif Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

H3: Terdapat pengaruh positif Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan analisis statistik SPSS versi 23.0.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa pada 20 desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampel jenuh*. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (kaur keuangan), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berikut merupakan sampel data kuesioner sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Sampel Data

1	Desa Brekat	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2	Desa Bulakwaru	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dilanjutkan

Lanjutan

3	Desa Bumiharja	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4	Desa Jatirawa	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5	Desa Kabukan	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
6	Desa Kalijambe	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
7	Desa Karangjati	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
8	Desa Karangmangu	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
9	Desa Kedokan Sayang	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
10	Desa Kedung Bungkus	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dilanjutkan

Lanjutan

11	Desa Kemanggungan	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
12	Desa Kesadikan	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
13	Desa Kesamiran	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
14	Desa Lebeteng	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
15	Desa Mangunsaren	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
16	Desa Margapadang	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
17	Desa Mindaka	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
18	Desa Purbasana	1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dilanjutkan

Lanjutan

19	Desa Setu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
20	Desa Tarub	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala desa, 2. Sekretaris desa, 3. Bendahara desa (kaur keuangan), 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variable

1. Definisi Konseptual

a. Variabel Bebas (Independen)

1) Kompetensi aparatur

Menurut Abdul (2010) dalam Nurkhasanah (2019), kompetensi aparatur yaitu kemampuan aparatur dalam (memahami peraturan pengelolaan dana desa) mengelola keuangan. Bertujuan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dengan suatu bekal pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang cukup memadai.

2) Partisipasi masyarakat

Menurut Sujarweni (2015), partisipasi masyarakat yaitu bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Prinsip yang menyatakan bahwa setiap warga didesa yang bersangkutan memiliki hak untuk terlibat langsung dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal.

3) Pemanfaatan teknologi informasi

Menurut Wilkinson et al. (2000) dalam (Nurkhasanah (2019), pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan secara maksimal dari komputer, perangkat lunak, database, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis-jenis lainnya yang berkaitan dengan teknologi.

b. Variabel Terikat (Dependen)

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Nurkhasanah (2019), akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatannya terkait dengan pengelolaan dana desa.

2. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. 2
Operasionalisasi Variable

Variable	Dimensi	Indikator	Skala
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Kejujuran dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kejujuran dan keterbukaan informasi ▪ Kepatuhan dalam pelaporan 	Interval
	Proses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesesuaian prosedur ▪ Kecukupan informasi ▪ Ketepatan penyampaian laporan 	
Kompetensi Aparatur (X1)	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengetahuan ▪ Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan 	Interval

Dilanjutkan

Lanjutan

	Kemampuan (<i>skill</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keahlian teknis ▪ Kemampuan mencari solusi 	
	Sikap (<i>attitude</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inisiatif dalam bekerja ▪ Keramahan dan kesopanan 	
Partisipasi Masyarakat (X2)	Pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa 	Interval
	Penyusunan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengusulkan rencana anggaran ▪ Terlibat dalam rapat paripurna 	
	Pelaksanaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlibat mengawasi dan melaporkan ▪ Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran ▪ Memberikan penghargaan 	
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecukupan jumlah komputer yang ada dan tersedia ▪ Adanya software pendukung ▪ Ketersediaan jaringan internet ▪ Adanya jadwal pemeliharaan peralatan 	Interval
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimanfaatkan sesuai ketentuan ▪ Proses terkomputerisasi 	

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung diserahkan kepada responden di desa se-Kecamatan Tarub. Kuesioner yang sudah diisi oleh responden diseleksi

dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Penelitian ini memilih cara demikian dengan pengembangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi resiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

Dalam pengisian jawaban, penulis memberikan skor tiap item jawaban dengan skala likert. Skala *Likert* alat atau cara untuk mengukur pendapat, persepsi dan sikap seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Dengan skala *Likert* maka variable yang diukur kemudian dijabarkan menjadi indikator variable. Kemudian jawaban setiap item yang menggunakan skala *Likert* memiliki nilai dari sangat positif sampai sangat negative, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2016) sebagai berikut:

Sangat Setuju	: 5
Setuju	: 4
Netral	: 3
Tidak Setuju	: 2
Sangat Tidak Setuju	: 1

E. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas di gunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner di katakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Hasil uji validasi masing-masing indikator variabel terhadap total skor konstruk untuk variabel Kompetensi Aparatur, Partisipasi

Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, menunjukkan hasil yang signifikan yaitu jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ ($0,000 \geq 0,05$). Maka item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (valid). Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ ($0,000 < 0,05$) maka item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (tidak valid).

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha* (α) lebih besar dari 0,60 atau 60% (Ghozali, 2016).

F. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Penelitian juga menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari *mean*, standar deviasi, minimum dan maksimum (Ghozali, 2016).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik atau persyaratan analisis yang diperlukan untuk penelitian yang menggunakan statistik inferensial, khususnya statistik

parametrik. Uji Asumsi Klasik dapat dijelaskan melalui Uji Normalitas, dan Uji Multikolonieritas, dari kedua Uji tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel indepen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Persamaan regresi linear berganda. dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$APDD = \alpha + \beta_1 KA + \beta_2 PM + \beta_3 PTI + e$$

Keterangan:

APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

KA = Kompetensi Aparatur

PM = Partisipasi Masyarakat

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

ε = Standar error

4. Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai masing-masing koefisien regresi dengan (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2016) :

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P_{value} < \alpha = 0,025$, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P_{value} > \alpha = 0,025$, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

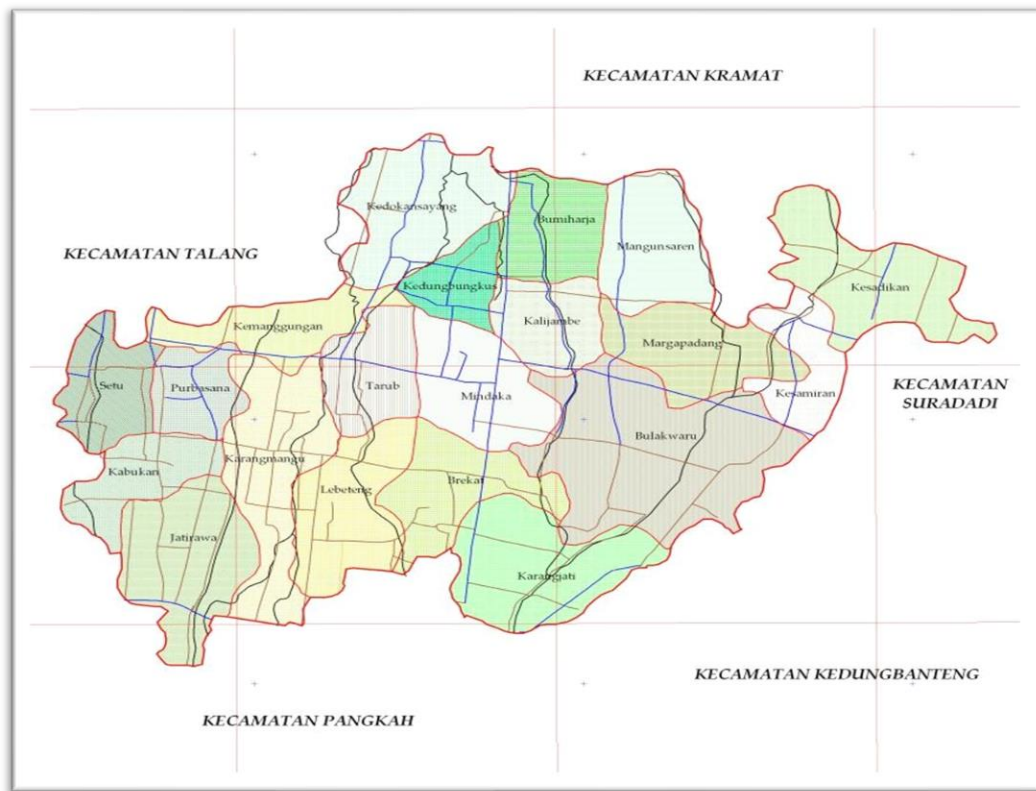
b. Koefisien Determinasi R^2

Menurut Ghozali (2016), Koefisien determinasi R^2 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah nol sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian



Sumber : Kecamatan Tarub dalam angka, 2020

Gambar 4. 1
Peta Kecamatan Tarub

1. Kondisi Wilayah

Kecamatan Tarub terletak pada posisi antara 109°04'25" BT - 109°08'04" BT dan antara 6°53'44" LS – 6°55'11" LS, memiliki wilayah yang terdiri dari daratan bukan pesisir. Luas Kecamatan Tarub adalah 2682 hektar terdiri dari 67.89 % merupakan lahan sawah yaitu 1821 hektar, sementara bukan lahan sawah 861 hektar atau sebesar 32.11% persen. Besarannya luas lahan sawah seluruhnya sawah pengairan teknis dan ditanami padi sebanyak tiga kali

dalam setahun. Wilayah Kecamatan Tarub berada \pm 6 km di sebelah utara ibukota Kabupaten Tegal yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 14 – 27 meter dari atas permukaan laut. Terdapat 20 desa yang terdiri dari 350 RT (Rukun Tetangga) dan 56 RW (Rukun Warga) serta terbagi dalam 51 pedukuhan dengan jarak terjauh sekitar 9 km dari desa Kesadikan di sebelah timur ke desa setu di bagian barat wilayah dengan batas - batas sbb:

- a. Sebelah utara : Kecamatan Kramat.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Kedungbanteng dan kec. Suradadi.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pangkah.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Talang.

2. Kependudukan

Secara administratif wilayah Kecamatan Tarub terdiri dari 20 Desa. Penduduk di Kecamatan Tarub 2019 tercatat 84.410 jiwa. Terdiri dari 42.927 laki-laki dan 41.483 penduduk perempuan. Dengan pertumbuhan penduduk naik dari 2018 sebesar 1,07 %. Lebih jelasnya ada di tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4. 1
Daftar Penduduk Kecamatan Tarub

No	Nama Desa	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah	Rasio (%)
1	Jatirawa	3,202	3,001	6,203	106.70
2	Kabukan	1,988	1,922	3,910	103.43
3	Setu	2,400	2,279	4,679	105.31
4	Purbasana	1,790	1,675	3,465	106.87
5	Kemanggungan	1,096	1,059	2,155	103.49

Dilanjutkan

Lanjutan

6	Karangmangu	2,307	2,245	4,552	102.76
7	Lebeteng	2,252	2,232	4,484	100.90
8	Brekat	2,674	2,509	5,183	106.58
9	Karangjati	2,747	2,632	5,379	104.37
10	Bulakwaruh	4,055	3,941	7,996	102.89
11	Mindaka	1,922	1,957	3,879	98.21
12	Tarub	1,749	1,735	3,484	100.81
13	Kedungbungkus	1,237	1,168	2,405	105.91
14	Kedokansayang	2,802	2,724	5,526	102.86
15	Bumiharja	2,290	2,187	4,477	104.71
16	Kalijambe	1,701	1,655	3,356	102.78
17	Mangunsaren	1,744	1,638	3,382	106.47
18	Margapadang	1,594	1,566	3,160	101.79
19	Kesamiran	1,145	1,140	2,285	100.44
20	Kesadikan	2,232	2,218	4,450	100.63
Σ	Jumlah Total	42,927	41,483	84,410	103.48

Sumber : Kecamatan Tarub dalam angka, 2020

3. Anggaran ADD Tiap Desa di Kecamatan Tarub

Tabel 4. 2
Anggaran Dana Desa

No	Nama Desa	Anggaran Dana Desa (Rp)
1	Brekat	1.226.633.000
2	Bulakwaru	1.340.538.000

Dilanjutkan

Lanjutan

3	Bumiharja	1.116.219.000
4	Jatirawa	1.166.213.000
5	Kabukan	1.410.369.000
6	Kalijambe	1.140.369.000
7	Karangjati	1.044.643.000
8	Karangmangu	1.170.165.000
9	Kedokansayang	993.057.000
10	Kedungbungkus	1.182.188.000
11	Kemanggungan	1.105.577.000
12	Kesadikan	1.332.514.000
13	Kesamiran	940.842.000
14	Lebeteng	1.062.272.000
15	Mangunsaren	1.071.560.000
16	Margapadang	1.219.463.000
17	Mindaka	1.126.541.000
18	Purbasana	1.011.741.000
19	Setu	1.318.719.000

Dilanjutkan

Lanjutan

20	Tarub	1.143.766.000
Σ	Jumlah Total	23.123.433.000

Sumber : Kecamatan Tarub dalam angka, 2020

4. Struktur Pemerintahan Kecamatan Tarub

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, tentang Kecamatan Bab I, Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya pada angka 9 dalam PP Nomor 19 tahun 2008 tersebut, dijelaskan cakupan tugas yakni sebagai pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah seperti:

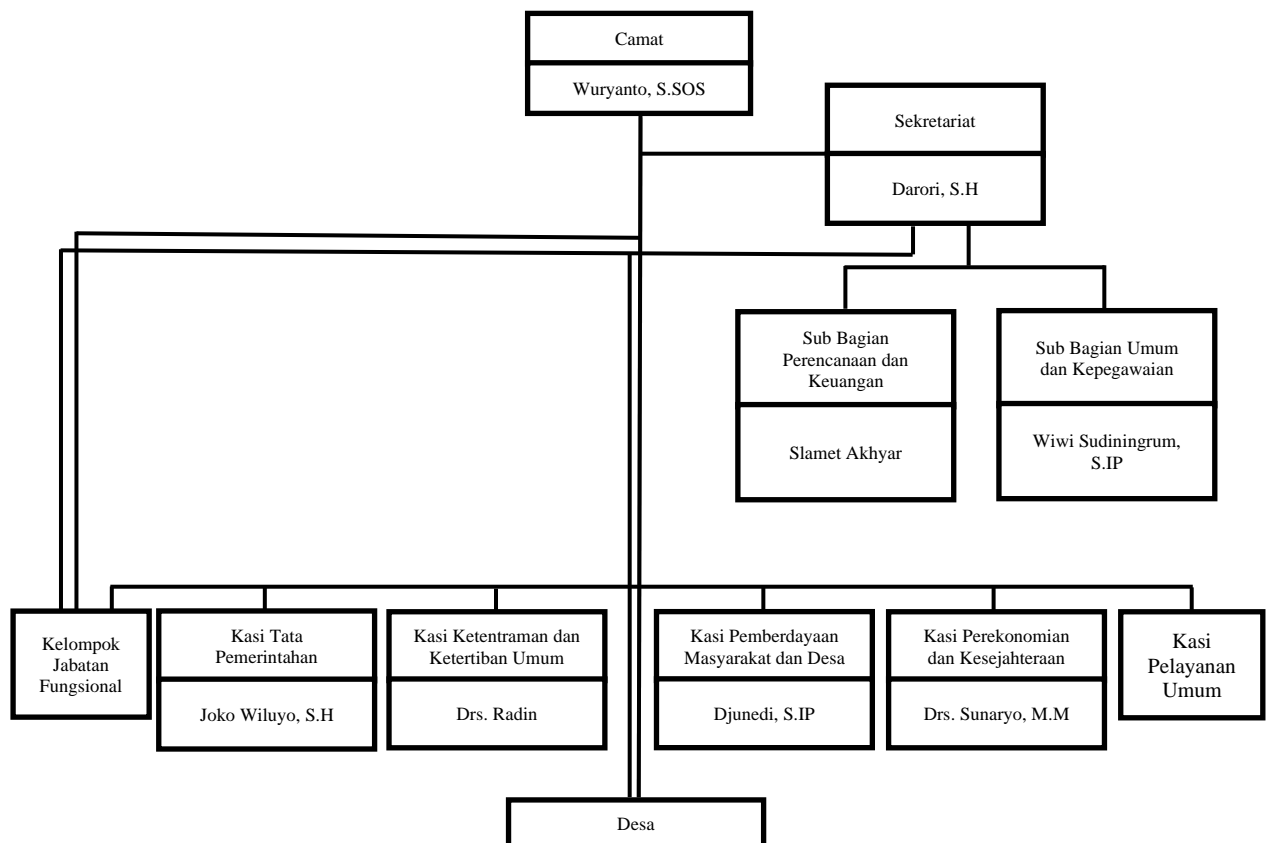
- 1) Perizinan
- 2) Rekomendasi
- 3) Koordinasi
- 4) Pembinaan

Fungsi Kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat structural eselon III dan IV, jadi secara umum tupoksi Kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Sebagai Pembina administrasi umum dan pemerintahan
- 2) Memberikan rekomendasi perizinan

- 3) Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan
- 4) Memberikan pelayanan legalisasi kartu penduduk dan kartu keluarga
- 5) Memberikan pelayanan umum terkait dengan peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat
- 6) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- 7) Dalam melaksanakan tugas Camat bertanggungjawab kepada Bupati

Adapun bagan struktur pemerintahan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:



Gambar 4. 2
Struktur Pemerintahan Kantor Kecamatan Tarub

Sumber : Kecamatan Tarub dalam angka, 2020

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Populasi dalam penelitian ini adalah 4 Perangkat Desa pada 20 desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD di Pemerintahan Desa di Kecamatan Tarub yang berjumlah 80 responden. Sesuai dengan metode pengambilan sampel yaitu menggunakan sampel jenuh maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner pada setiap desa yang berjumlah 20 desa. Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 16 April 2020 – 16 Mei 2020. Distribusi mengenai penyebaran kuisisioner disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Distribusi Penyebaran Kuesioner

No.	Nama Desa di Kecamatan Tarub	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
1.	Brekat	4	4
2.	Bulakwaru	4	4
3.	Bumiharja	4	4
4.	Jatirawa	4	4
5.	Kabukan	4	4
6.	Kalijambe	4	4
7.	Karangjati	4	4
8.	Karangmangu	4	4
9.	Kedokansayang	4	4
10.	Kedungbungkus	4	4
11.	Kemanggungan	4	4

Dilanjutkan

Lanjutan

12.	Kesadikan	4	4
13.	Kesamiran	4	4
14	Lebeteng	4	4
15	Mangunsaren	4	4
16	Margapadang	4	4
17	Mindaka	4	4
18	Purbasana	4	4
19	Setu	4	4
20	Tarub	4	4

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Dari 80 (100%) kuesioner yang disebar, 80 (100%) kuesioner diterima kembali. Dari kuesioner yang diterima kembali, terdapat 6 kuesioner yang tidak sah sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah berjumlah 74 (93%) data yang diperoleh nantinya akan diolah untuk menguji hipotesis. Berikut merupakan tabel tingkat pengembalian kuesioner.

Tabel 4. 4
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	80	100%
Kuesioner yang kembali	80	100%
Kuesioner yang tidak sah	6	8%
Kuesioner yang dapat diolah	74	93%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu menurut jenis kelamin, usia, pendidikan

dan masa kerja pada Desa se-Kecamatan Tarub. Berikut di sajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja.

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, tabel di bawah ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini kebanyakan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 64 respknden (86%) sedangkan berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 responden (14%).

Tabel 4. 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	64	86%
Perempuan	10	14%
Total	74	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

b. Usia

Berdasarkan usia responden, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur antara 46-65 tahun yaitu sebanyak 31 responden (42%), dilanjutkan dengan umur antara 36-45 tahun sebanyak 29 responden (39%), kemudian berumur 26-35 tahun sebanyak 7 responden (9%), serta berumur antara 56-65 tahun sebanyak 7 responden (9%).

Tabel 4. 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Frekuensi	Presentase (%)
26-35	7	9%
36-45	29	39%
46-55	31	42%
56-65	7	9%
Total	74	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

c. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan SMA yaitu sebanyak 50 responden (68%), pendidikan S-1 sebanyak 21 responden (28%), pendidikan S-2 sebanyak 1 responden (1%), responden dengan tingkat pendidikan D-3 sebanyak 1 responden (1%) dan tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 responden (1%).

Tabel 4. 7
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SMP	1	1%
SMA	50	68%
D3	1	1%
S1	21	28%
S2	1	1%
Total	74	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

d. Masa Kerja

Berdasarkan masa kerja, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini telah bekerja selama 1-5 tahun sebanyak 56 responden (76%), bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 6 responden (8%) bekerja selama 11-15 tahun sebanyak 5 responden (7%), bekerja selama 16-20 tahun sebanyak 3 responden (4%), bekerja selama 21-25 tahun sebanyak 2 responden (3%), bekerja selama 26-30 tahun sebanyak 1 responden (1%) dan bekerja selama 31-35 tahun sebanyak 1 responden (1%).

Tabel 4. 8
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja (Tahun)	Frekuensi	Presentasi (%)
1-5	56	76%
6-10	6	8%
11-15	5	7%
16-20	3	4%
21-25	2	3%
26-30	1	1%
31-35	1	1%
Total	74	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

3. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas di gunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner di katakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Dari hasil validitas didapatkan tiga

variabel, yaitu variabel Kompetensi Aparatur (X1), Partisipasi masyarakat (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), akuntabilitas (Y). Nilai korelasi dibandingkan dengan dengan r tabel, r tabel dicari pada signifikan 0,5 dengan (n) = 80 atau df = 74, maka di dapat r tabel sebesar 0,227, jika r hitung > r tabel maka angket dikatakan valid, begitu juga sebaliknya. Jika r hitung < r tabel maka angket dikatakan tidak valid.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Soal	Validitas		Keterangan
		r Tabel	R Hitung	
Kompetensi Aparatur	KA.1	0,227	0,565	valid
	KA.2	0,227	0,792	valid
	KA.3	0,227	0,756	valid
	KA.4	0,227	0,692	valid
	KA.5	0,227	0,779	valid
	KA.6	0,227	0,827	valid
Partisipasi Masyarakat	PM.1	0,227	0,654	valid
	PM.2	0,227	0,773	valid
	PM.3	0,227	0,759	valid
	PM.4	0,227	0,760	valid
	PM.5	0,227	0,722	valid
	PM.6	0,227	0,665	valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	PTI.1	0,227	0,677	valid
	PTI.2	0,227	0,766	valid
	PTI.3	0,227	0,690	valid
	PTI.4	0,227	0,783	valid
	PTI.5	0,227	0,664	valid

Dilanjutkan

Lanjutan

	PTI.6	0,227	0,801	valid
Akuntabilitas	A.1	0,227	0,775	valid
	A.2	0,227	0,699	valid
	A.3	0,227	0,767	valid
	A.4	0,227	0,751	valid
	A.5	0,227	0,788	valid

Sumber : Olah Data SPSS Versi 23

Dari tabel 4.7 Terlihat bahwa r hitung $>$ r tabel semua. Maka dari data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pernyataan angket valid.

b. Uji Reliabilitas

Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliable apabila memiliki *Croancbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Uji reliabilitas untuk masing-masing pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas menggunakan program SPSS 23.0, adapun hasil perhitungannya:

Tabel 4. 10
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	r Hitung	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur	0,833	0,6	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,818	0,6	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,824	0,6	Reliabel
Akuntabilitas	0,811	0,6	Reliabel

Sumber : Olah Data SPSS Versi 23

Dari tabel 4.8 Diketahui bahwa koefisien reliabilitas variabel kompetensi aparatur sebesar 0,833, koefisien partisipasi masyarakat sebesar 0,818 koefisien pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,824, dan koefisien akuntabilitas sebesar 0,811. Hal ini menunjukkan bahwa semua koefisien reliabilitas $> 0,6$ maka dinyatakan reliabel.

4. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi memberikan gambaran atau deskriptif suatu data dalam penelitian yang dapat dilihat dari rata-rata (mean) dan standar deviasi. Nilai terendah adalah nilai terkecil dari distribusi suatu data sedangkan nilai tertinggi adalah nilai terbesar dari distribusi suatu data. Pengukuran nilai mean (rata-rata) merupakan suatu pengukuran yang umum digunakan atau dipakai dalam mengukur nilai sentral dari distribusi suatu data. Adapun hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan SPSS 23.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 11
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur	74	13.00	30.00	22.6081	4.25173
Partisipasi Masyarakat	74	14.00	30.00	22.5270	4.05518
Pemanfaatan Teknologi Informasi	74	14.00	30.00	22.5405	4.46965
Akuntabilitas	74	10.00	19.00	15.7703	2.94492
Valid N (listwise)	74				

Sumber : Olah Data SPSS Versi 23

Tabel 4.7 diatas menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti. Variabel Akuntabilitas jumlah (n) sebesar 74 memiliki nilai minimum 10,00, nilai maximum 19,00, nilai rata-rata sebesar 15,7703 satuan dan standar deviasi sebesar 2,94492 satuan. Variabel Kompetensi Aparatur jumlah (n) sebesar 74 memiliki nilai minimum 13,00, nilai maximum 30,00, nilai rata-rata sebesar 22,6081 satuan dan standar deviasi sebesar 4,25173 satuan. Variabel Partisipasi Masyarakat jumlah (n) sebesar 74 memiliki nilai minimum 14,00, nilai maximum 30,00, nilai rata-rata sebesar 22,5270 satuan dan standar deviasi sebesar 4,05518 satuan. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi jumlah (n) sebesar 74 memiliki nilai minimum 14,00, nilai maximum 30,00, nilai rata-rata sebesar 22,5405 satuan dan standar deviasi sebesar 4,46965 satuan.

5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, uji normalitas dan uji multikolonieritas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Dikatakan model regresi yang baik apabila memiliki distribusi yang normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan cara melihat nilai probabilitasnya. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai *Asymp. Sig.* > 5% maka data residual berdistribusi normal dan jika nilai *Asymp. Sig.* < 5% maka data residual tidak berdistribusi normal. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		74
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.34163074
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.061
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

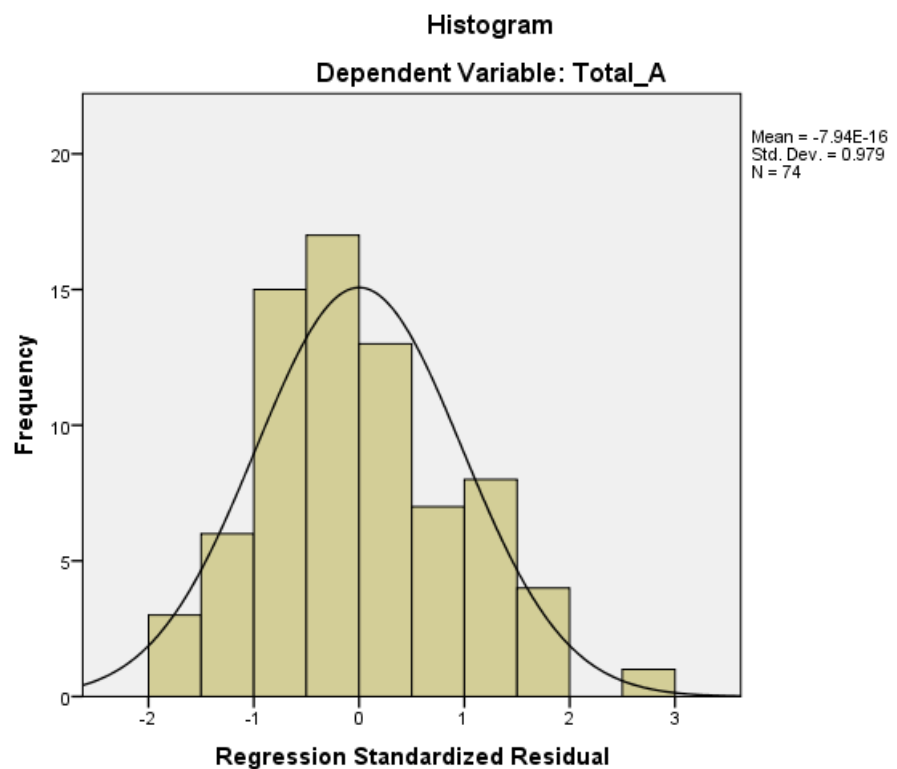
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

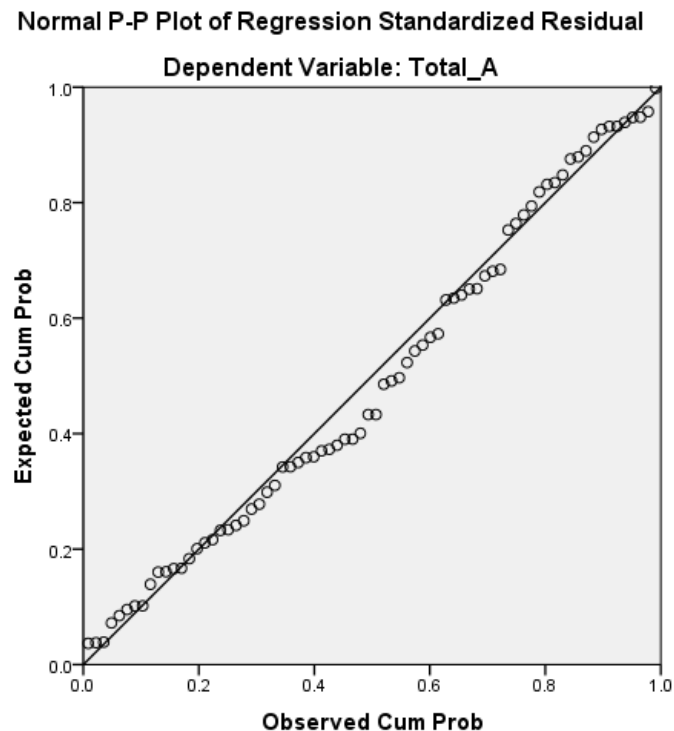
Sumber : Olah Data SPSS Versi 23

Berdasarkan tabel diatas, pengujian menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukan bahwa tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga data diatas dapat dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas secara grafik histogram dan grafik normal *probability plot* dengan menggunakan SPSS versi 23.0 ditunjukan dengan grafik di bawah ini:



Gambar 4. 3
Grafik Histogram Uji Normalitas

Sumber : Olah Data SPSS Versi 23



Gambar 4. 4
Grafik Normal Plot Uji Normalitas

Sumber : Olah Data SPSS Versi 23

Berdasarkan tampilan grafik Normal P-Plot di atas, dapat disimpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dari perhitungan nilaitolerance serta *Varian Inflation Factor* (VIF). Suatu model regresidikatakan tidak

memiliki kecenderungan adanya gejala multikolonieritas adalah apabila nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas

Tabel 4. 13
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kompetensi Apaatur	.533	1.878
Partisipasi Masyarakat	.532	1.879
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.926	1.080

Sumber : Olah Data SPSS Versi 23

Semua hasil variabel diatas diperoleh bahwa nilai toleran $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

6. Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda yang baik adalah yang memenuhi kriteria uji asumsi klasik yaitu data harus normal dan model bebas dari multikolonieritas. Dari analisis sebelumnya terbukti bahwa model dalam penelitian ini memenuhi kriteria asumsi klasik sehingga model dalam penelitian ini dianggap baik. Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 23.0 menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 4. 14
Hasil Analisa Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.878	1.485		3.285	.002
Kompetensi Aparatur	.276	.068	.399	4.040	.000
Partisipasi Masyarakat	.366	.072	.505	5.109	.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.160	.049	-.243	-3.246	.002

a. Dependent Variable: Total_A

Sumber : Olah Data SPSS Versi 23

Pada tabel 4.5 Pada Kolom *unstandardized coefficient* (B). Tertera nilai *constant* sebesar 4,878, koefisien Kompetensi Aparatur sebesar 0,276, Partisipasi Masyarakat sebesar 0,366, dan koefisien Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar -0,160 sehingga didapat model persamaan regresi akhir sebagai berikut:

$$APDD = \alpha + \beta_1 KA + \beta_2 PM + \beta_3 PTI + e$$

$$APDD = 4,878 + 0,276 KA + 0,366 PM - 0,160 PTI + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta adalah sebesar 4,878 menjelaskan bahwa Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi nilainya 0 maka nilai dari struktur modal sebesar 4,878 satuan.
2. Nilai koefisien dari Kompetensi Aparatur sebesar 0,276 satuan bernilai positif, artinya apabila kompetensi aparatur naik satu-satuan maka akan menaikkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa sebesar 0,276.

3. Nilai koefisien dari Partisipasi Masyarakat sebesar 0,366 satuan bernilai positif, artinya apabila partisipasi masyarakat naik satu-satuan maka akan menaikkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa sebesar 0,366.
4. Nilai koefisien dari Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar -0,160 satuan bernilai negatif, artinya apabila pemanfaatan teknologi informasi naik satu-satuan maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa sebesar -0,160.

7. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini adalah koefisien determinan R^2 dan uji parsial (Uji t).

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau parsial antara kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada penelitian ini pengujian dengan menggunakan signifikansi level 0.025 ($\alpha = 2,5\%$). Adapun kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P_{value} < \alpha = 0,025$, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P_{value} > \alpha = 0,025$, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Secara parsial pengaruh dari masing-masing variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 15
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.878	1.485		3.285	.002
Kompetensi Aparatur	.276	.068	.399	4.040	.000
Partisipasi Masyarakat	.366	.072	.505	5.109	.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.160	.049	-.243	-3.246	.002

a. Dependent Variable: Total_A

Sumber : Olah Data SPSS Versi 23

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas maka diperoleh interpretasi sebagai berikut:

- 1) Untuk hasil uji t diketahui untuk variabel Kompetensi Aparatur (X1) memiliki nilai *Coefficients* β sebesar 0,276 dan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,025$ sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,025$ maka $t_{\text{tabel}} = t(0,025; n-k-1) = t((0,025); (74-3-1)) = t(0,025; 70) = 1,99444$ itu berarti nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,040 > 1,99444$) maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- 2) Untuk hasil uji t diketahui untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X2) memiliki nilai *Coefficients* β sebesar 0,366 dan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,25$ sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,025$ maka

$t_{\text{tabel}} = t(0,025; n-k-1) = t(0,025; (74-3-1)) = t(0,025; 70) = 1,99444$ itu berarti nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,109 > 1,99444$) maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

- 3) Untuk hasil uji t diketahui untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) memiliki nilai *Coefficients* β sebesar -0,160 dan nilai signifikansi sebesar $0,02 < 0,025$ sementara t tabel dengan sig. $\alpha = 0,025$ maka $t_{\text{tabel}} = t(0,025; n-k-1) = t(0,025; (74-3-1)) = t(0,025; 70) = 1,99444$ itu berarti nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-3,246 < 1,99444$) maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

b. Koefisien Determinasi R^2

Uji koefisien determinasi yang dihasilkan melalui nilai *adjusted Rsquare* pada model regresi digunakan untuk menunjukkan besaran variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Hasil pengujian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 16
Hasil Koefisien Determinasi R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.798 ^a	.636	.621	1.81324

a. Predictors: (Constant), Total_PT1, Total_KA, Total_PM

Sumber : Olah Data SPSS Versi 23

Berdasarkan data diatas didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,621 atau 62,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh variabel Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 62,1%, sedangkan sisanya sebesar 37,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka berikut ini adalah hasil pembahasan pada penelitian ini:

- a. Untuk menguji hipotesis pertama, yang menyatakan diduga pengaruh kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan hasil nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,025$ sementara t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,040 > 1,99444$). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mada et al. (2017). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kompetensi aparatur merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Atiningsih & Ningtyas (2019) dan Wahyuni et al. (2018) yang mengatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kompetensi aparatur pengelola dana desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin bagus.

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan Widyatama & Novita (2017) yang mengatakan bahwa Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa

secara signifikan tidak memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Pengelolaan Dana Alokasi desa ada beberapa kendala yang di hadapi oleh Aparatur Pemerintah desa yaitu lemahnya kompetensi sumber daya manusia aparatur desa dalam hal ini aparatur pemerintah desa rata – rata berpendidikan (SMA), minimnya pengetahuan aparatur desa dalam hal penyajian dan penyusunan laporan keuangan dalam hal ini rata – rata responden menjawab ragu – ragu mengenai mekanisme dan teknik sistem akuntansi pemerintahan. Selain itu Pemahaman responden dalam menggunakan komputer untuk bekerja masih rendah dan kurangnya minat untuk mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pemahaman memadai mengenai standar akuntansi pemerintahan khususnya Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 belum bisa diterapkan dengan baik

- b. Untuk menguji hipotesis kedua, yang menyatakan diduga pengaruh partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan hasil nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,25$ sementara t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,109 > 1,99444$). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Umairah & Adnan (2019). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Agus Suma Arta & Rasmini (2019), (Mada et al., 2017) dan (Atiningsih & Ningtyas, 2019) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar partisipasi masyarakat dalam pemerintah desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin bagus.

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan Indah Mudarosatun (2017) dan Kumalasari (2018) yang menyatakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pembangunan masih kurang, disisi lain aparat desa telah memiliki tim khusus Pelaksana Kegiatan (PK) pengelolaan dana desa yang telah ditunjuk aparat desa untuk menyelesaikan pembangunan.

- c. Untuk menguji hipotesis ketiga, yang menyatakan diduga pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan hasil nilai signifikansi sebesar $0,02 < 0,025$ sementara t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-3,246 < 1,99444$).

Dapat dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal masih belum digunakan secara maksimal dalam pelaporan dana desa. Meskipun telah ada software yang ditetapkan oleh pemerintah, para aparat pengelola dana desa masih menganggap hal tersebut hanya sebagai kewajiban saja, tanpa mengetahui kegunaan dan manfaat dari teknologi informasi secara detil. Teknologi Informasi hanya dipahami secara mendasar saja. Terbukti dengan hasil yang signifikan (0,02) dengan koefisien -0,160 yang berarti semakin banyak digunakan teknologi informasi semakin turun tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Karyadi, 2019) yang menyatakan bahwa masih kurangnya kesadaran pemerintah dan setaf desa

akan pentingnya teknologi untuk mendapatkan informasi secara cepat, tanggap dan sigap, kemajuan teknologi informasi pada saat sekarang ini masih belum bisa dimanfaatkan di karenakan kurangnya ketersediaan teknologi. Teknologi hanya di gunakan untuk hal-hal yang tidak penting bukan untuk mendapatkan informasi.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian (Nurkhasanah, 2019), (Karyadi, 2019) dan (Sapartiningsih et al., 2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan. Mereka menunjukkan bahwa semakin besar pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintah desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin bagus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya kompetensi yang baik yang dimiliki oleh aparat desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin bagus. Hal ini dikarenakan pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, mempunyai keterampilan, dan sikap yang baik akan selalu bekerja dengan efektif, efisien dan produktif sehingga kinerja pengelolaan dan desa akan meningkat, dengan dibuktikan pada penelitian ini nilai signifikansi $0,00 < 0,025$.
2. Dengan adanya suatu partisipasi masyarakat yang baik dalam mengawasi jalanya pemerintahan desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin bagus. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan akan menjadi semakin baik ke depannya, dengan dibuktikan pada penelitian ini nilai signifikansi $0,00 < 0,025$.
3. Dengan adanya suatu pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam jalanya pemerintahan desa, maka akuntabilitas juga akan semakin bagus. Hal ini dikarenakan semua informasi dan data-data sudah terintegrasi

dan dijalankan dengan teknologi yang bagus, dengan dibuktikan pada penelitian ini nilai signifikansi $0,02 < 0,025$.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini untuk hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dimungkinkan adanya faktor-faktor penghambat lainnya seperti, jumlah komputer yang masih sedikit di beberapa desa, kemudian jaringan internet yang belum tersedia sepenuhnya seperti wifi. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Tarub sebaiknya memperhatikan inventaris desa agar informasi dan pelaporan dana desa lebih mudah di akses oleh beberapa pihak termasuk masyarakat.
2. Bagi publik atau masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas penelitian ini dengan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mana belum dibahas dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga bisa menambah sampel atau desa yang akan diteliti.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang digunakan baru desa se-Kecamatan Tarub yang berjumlah 20 desa, sehingga penelitian ini

memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan di lingkungan di desa lain di Kabupaten Tegal.

2. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan data diperoleh berdasarkan persepsi responden berupa jawaban yang terdapat kemungkinan bahwa hasil jawaban akan berbeda dengan keadaan sebenarnya.
3. Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan variabel dimana variabel yang diteliti hanya kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, kejelasan sistem anggaran dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. (2010). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada PT.AVIA AVIAN. Tesis. *Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional. Surabaya. Jawa Timur.*
- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Suma Arta, I. M., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 709. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p26>
- Arfin, Y. (2019). *Jumlah Desa Naik, Kemendes Pantau Pemanfaatan Penggunaan Dana Desa*. *Www.News.Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-4777665/jumlah-desa-naik-kemendes-pantau-pemanfaatan-penggunaan-dana-desa>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. (Cetakan 1). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Chabib Sholeh dan Heru Rochansjah. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. In *Bandung: Fokusmedia* (Cetakan pe). Fokusmedia.
- Chomariyah, Ariyanto, B., & Hudi, N. (2016). *Keuangan Desa Pesisir*. Malang: Inteligensia Media.
- Dwiyanto, A. (2012). *Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia*. (Jilid Dua).Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency Problem and Residual Claims. *Journal of Law & Economics*, XXVI.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haag, S., & Keen, P. (1996). *Information Technology: Tomorrow's Advantage Today*. New York: McGraw-Hill.
- Hartanto, E. (2017). *Teori Kompetensi Manajemen Sumber Daya Manusia*.

- Hayat, M. (2019). *KPK Temukan Empat Potensi Masalah Terkait Kasus Dana Desa*. [Www.Jawapos.Com. http://www.jawapos.com/nasional/07/11/2019/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa/](http://www.jawapos.com/nasional/07/11/2019/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa/)
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2008). *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Indah Mudarosatun, N. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Di Kabupaten Ponorogo)*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Kartasasmita, G. (1997). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*. Yogyakarta: UGM.
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*, 7(2).
- Kementrian Dalam Negeri. (2014). Peraturan Kemendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014*. Jakarta, DKI. [https://doi.org/10.1016/0034-5687\(85\)90130-6](https://doi.org/10.1016/0034-5687(85)90130-6)
- Kumalasari, L. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Peran Kepala Desa Sebagai Variable Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bayat). *Fakultas Ekonomi. Universitas Widya Dharma. Klaten*.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. 106–115.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martin, E. (1999). *Managing Information Technology What Managers Need to Know*. (3rd Ed). New Jersey: Pearson Education International.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.

- Medianti, L. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variable Pemodesari (Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bayat). *JOM FEB, 1*(Dd).
- Moeheriono. (2018). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. (Cetakan 2). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Murhada, & Giap, Y. C. (2011). *Pengantar Teknologi Informasi*. Tangerang: Mitra Wacana Media.
- Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Magelang, 53*(9), 1689–1699.
- Oji / Humas Setkab. (2019). *Inilah Hasil Dana Desa Yang Sudah Dikucurkan Sejak 2015*. Wwww.Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/inilah-hasil-dana-desa-yang-sudah-dikucurkan-sejak-2015/>
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta*.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang tentang Desa. *UU Nomer 6 Tahun 2014. Jakarta, DKI*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Rismawati, T. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Infomasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sanoff, H. (2000). *Community Participation Methods in Design and Planning*. John Willey & Sons Inc: USA.
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, 14*(1 Maret), 100–114.
- Saragih, R., & Agung, S. (2017). Peran Komunikasi politik Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa. *Vol. 7 No. 1 (2017)*, 59–69.

- Sembodo, H. (2006). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Universitas Brawijaya. Malang.*
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggara Pemerintah Berbasis Partisipasi Masyarakat.* Malang: Setara Press.
- Solihin, D. (2007). Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik. *Vol., No., Hlm.*
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari , Kecamatan Karawang Timur , Kecamatan Majalaya). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Padjadjaran. Sumedang.*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Cetakan 23). Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supadmi, N. ., & Suputra, D. . D. (2018). s. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata, 13*(2), 132–145.
<http://www.jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/383/332>
- Talizuduhu, N. (1990). *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, B. (2001). *Reformasi Administrasi Publik.* Jakarta: MIA – UNKRIS.
- Umairah, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 4*(3), 471–481.
- Wahyuni, S., Indrawati, N., & Azhar L, A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ekonomi,* 26.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Widyatama, A., & Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *STIE Panca Bhakti. Palu, 02*(02), 1–20.
- Wilkinson, J, W., & Cerullo, M. . (2000). *Acoounting Information System: Essential Concept and Aplication.* (Edisi 3). New York: John Willey and Sons.

Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN



**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Oleh:

Fauzi Chuzlan Alauddin

NPM : 4316500059

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2020

KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu

Pejabat/Pegawai Pemerintah Desa.....

Di Tempat

Hal : Permohonan Mengisi Kuesioner Penelitian

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, peneliti:

Nama : Fauzi Chuzlan Alauddin

NIM : 4316500059

Program Studi : Akuntansi

Alamat : Desa Bumiharja RT 03/ RW 02 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)”.

Dengan ini, peneliti mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Semua jawaban yang dipilih adalah benar. Maka dari itu, peneliti mengharapkan Bapak/Ibu memberikan jawaban sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu bekerja. Peneliti sangat menghargai partisipasi Bapak/Ibu sebagai responden dalam penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Mengingat keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, dimohon dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan lengkap. Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah mengisi kuesioner ini.

Hormat Saya,

Fauzi Chuzlan Alauddin
NPM : 4316500059

IDENTITAS RESPONDEN

Sebelum mengisi kuesioner, dimohon untuk memberikan data-data dibawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Umur :(Tahun)

☐ SMP ☐ SMA

Pendidikan Terakhir : ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2

NIP :

Jabatan/ Pangkat :

Lama bekerja di posisi
saat ini (Tahun) :

DAFTAR PERTANYAAN

Petunjuk Pengisian

Peneliti mengharapkan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak atau Ibu bekerja dengan memberi tanda centang (✓) pada table yang sudah tersedia dengan memilih:

Untuk alternative jawaban pertanyaan adalah sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

A. Kompetensi Aparatur

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya memahami Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa					
2	Saya memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai penyusun laporan keuangan					
3	Saya sebagai aparat desa melakukan pembukuan mendasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
4	Saya sering mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan					
5	Saya sebagai aparat desa mempunyai inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada					
6	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai					

B. Partisipasi Masyarakat

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Masyarakat di desa saya terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penyusunan program-program penggunaan dana desa					

2	Masyarakat di desa saya mengusulkan rencana anggaran alternatif untuk BPD terhadap rancangan anggaran desa untuk diajukan kepada pemerintah daerah					
3	Masyarakat di desa saya terlibat langsung dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh desa					
4	Masyarakat di desa saya terlibat secara aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa					
5	Masyarakat di desa saya secara aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran					
6	Masyarakat di desa saya memberikan penghargaan terhadap keberhasilan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa					

C. Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Di tempat kerja saya, mempunyai jumlah komputer yang cukup dan tersedia untuk digunakan					
2	Di tempat kerja saya, memiliki <i>software</i> atau aplikasi untuk melaksanakan tugas seperti: <i>Microsoft excel, Microsoft word</i> , dan lain sebagainya dalam mendukung pekerjaan					
3	Di tempat kerja saya, jaringan internet dengan kapasitas yang					

	memadai telah terpasang di kantor desa					
4	Di tempat kerja saya, komputer-komputer di rawat dengan baik dan jika ada kerusakan langsung diperbaiki					
5	Di tempat kerja saya, jaringan internet dimanfaatkan sebagai penghubung antara aparatur dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan					
6	Di tempat kerja saya, proses awal transaksi hingga pembuatan laporan di pemerintahan desa dilakukan secara terkomputerisasi					

D. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Di desa saya, semua penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah					
2	Di desa saya, laporan keuangan yang disajikan telah memuat dan mengungkapkan informasi yang cukup memadai					
3	Di desa saya, pemerintah desa telah mengikuti prosedur pelaksanaan pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa sesuai dengan jumlah yang ditentukan					
4	Di desa saya, penyusunan laporan pertanggungjawaban memuat realisasi pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa secara lengkap					

5	Di desa saya, pemerintah desa tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa					
---	--	--	--	--	--	--

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 PROGDI : MANAJEMEN, AKUNTANSI, DAN MANAJEMEN PAJAK
 (STATUS TERAKREDITASI)

Jl. Halmahera Km. 1 Telp. (0283) 355720 Tegal

Nomor : **158/K/E/FEB/UPS/XII/2019** Tegal, 06 Desember 2019
 Lampiran : -
 Perihal : **Ijin Penelitian**

Kepada : Yth. **Kepala Kantor Kecamatan Tarub Kab. Tegal**
 Jl. Raya Tangkil-Mindaka, Kec. Tarub
 Di- Kab. Tegal

Dengan hormat, salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis mahasiswa diwajibkan mengadakan penelitian sebagai bahan menyusun skripsi.

Berkenaan dengan hal itu, mohon berkenaan Bapak/Ibu membantu memberi data yang diperlukan dalam penelitian tersebut kepada mahasiswa :

N a m a : **Fauzi Chuzlan A**
 NPM : 4316500059
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih,

Dekan



Dr. Dien Noviany R., S.E., M.M., Akt., CA
 NIPY. 136628111975



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KECAMATAN TARUB

Alamat : Jalan Raya Tangkil No 45 Telp. (0283) 3447876 Kode Pos 52184

Nomor : 800/45/ 061/2020

Tarub, 12 Maret 2020

Lampiran : -

Perihal : **Bantuan Data Sebagai Bahan
Penelitian Mahasiswa UPS**

Kepada :

Yth. Kepala Desa se-Kec. Tarub

Di-

.....

Dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai surat dari Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 163/K/E/FEB/UPS/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Ijin Penelitian, maka kami sampaikan kepada Kepala Desa untuk dapat membantu memberikan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa UPS tersebut sebagai bahan penyusunan skripsi, yaitu :

Nama : FAUZI CHUZLAN ALAUDDIN

NPM : 4316500059

Program Studi : AKUNTANSI

Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih




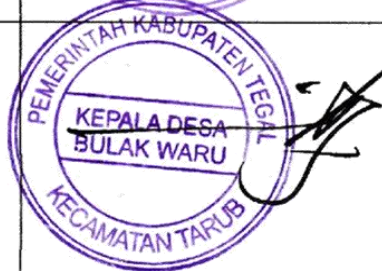



WURYANTO, S.Sos

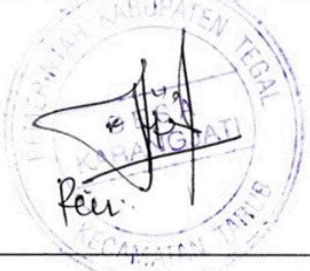

Pembina Tingkat I




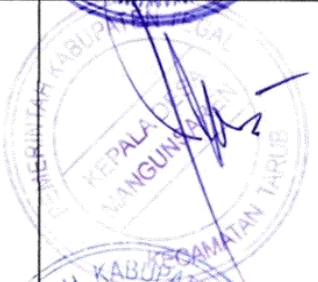


NIP 197209251992031002

Lampiran 3 : Bukti Pengambilan Data

TANDA IZIN PENGAMBILAN DATA PENELITIAN

No	KETERANGAN	TANDA PENGAMBILAN
1	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Brekat	
2	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Bulakwaru	
3	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Bumiharja	
4	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Jatirawa	
5	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Kabukan	

6	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Kalijambe	
7	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Karangjati	
8	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Karangmangu	
9	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Kedokan Sayang	
10	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Kedung Bungkus	
11	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Kemanggungan	

12	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Kesadikan	 RATONI
13	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Kesamiran	 RUMADE
14	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Lebeteng	 Anukasmu
15	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Mangunsaren	 [Signature]
16	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Margapadang	 ALI WARDONO, SH
17	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Mindaka	 Daryanto

18	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Purbasana	
19	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Setu	
20	Kepentingan Pembagian Kuesioner di Balai Desa Tarub	

Lampiran 4 : Dokumentasi Pengisian Kuesioner



Lampiran 5 : Dokumentasi Pembangunan Desa Menggunakan Dana Desa



Lampiran 6 : Dokumentasi Bentuk Partisipasi Masyarakat



Lampiran 7 : Data Hasil Penelitian

1. Tabulasi Jawaban Responden Variabel Kompetensi Aparatur

Jawaban Responden

No	Kompetensi Aparatur						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	4	4	4	4	3	3	22
2	4	4	4	3	3	4	22
3	5	4	5	4	4	3	25
4	3	4	4	2	4	2	19
5	5	4	4	4	4	4	25
6	4	2	4	2	4	4	20
7	5	4	3	4	3	3	22
8	5	2	4	2	4	2	19
9	5	4	5	4	5	5	28
10	4	5	5	5	5	5	29
11	4	5	4	5	4	5	27
12	4	3	2	4	2	3	18
13	5	5	5	4	5	5	29
14	5	2	3	5	2	4	21
15	4	5	5	3	5	5	27
16	2	4	3	3	4	2	18
17	4	4	4	4	4	4	24
18	4	2	4	4	4	2	20
19	5	5	5	5	5	5	30
20	4	3	4	3	2	2	18
21	5	4	4	5	5	5	28
22	4	5	3	5	5	5	27
23	3	3	4	5	5	3	23
24	3	3	2	2	3	3	16
25	4	4	4	4	4	4	24
26	3	5	5	5	5	5	28

27	4	5	4	3	4	3	23
28	4	2	3	2	4	2	17
29	3	4	4	4	4	4	23
30	4	4	4	4	4	4	24
31	3	4	4	5	4	3	23
32	5	5	5	4	5	5	29
33	5	3	4	3	4	3	22
34	3	2	3	3	3	2	16
35	5	5	5	5	5	5	30
36	5	4	4	4	5	4	26
37	4	5	4	4	3	4	24
38	3	3	2	3	2	3	16
39	5	5	5	3	3	3	24
40	4	4	4	5	5	5	27
41	4	4	3	4	4	3	22
42	3	2	4	2	3	4	18
43	4	4	4	3	4	3	22
44	3	4	5	3	4	3	22
45	5	4	5	5	5	5	29
46	5	3	2	3	2	2	17
47	5	5	5	4	4	5	28
48	5	5	4	4	4	5	27
49	3	4	4	4	3	4	22
50	3	2	2	3	2	3	15
51	5	5	3	4	3	3	23
52	3	4	5	3	5	3	23
53	5	4	4	3	3	3	22
54	3	2	4	4	2	2	17
55	4	4	4	3	4	3	22
56	5	3	3	3	4	4	22
57	3	3	4	2	2	3	17
58	4	3	4	4	4	3	22
59	5	4	3	4	4	3	23

60	4	5	3	4	4	3	23
61	4	3	2	3	2	2	16
62	3	4	4	3	4	4	22
63	3	4	5	4	4	3	23
64	5	4	3	3	3	4	22
65	4	2	2	4	2	2	16
66	5	5	5	5	5	5	30
67	5	5	5	5	5	5	30
68	2	2	2	2	2	3	13
69	5	4	4	5	3	3	24
70	4	4	4	4	4	4	24
71	4	4	3	3	4	4	22
72	2	3	2	3	3	2	15
73	4	5	4	5	2	3	23
74	4	4	4	4	4	4	24

2. Tabulasi Jawaban Responden Variabel Partisipasi Masyarakat

Jawaban Responden

No	Partisipasi Masyarakat						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	4	3	4	3	4	4	22
2	4	3	4	4	3	4	22
3	4	3	4	3	3	4	21
4	3	2	2	3	2	2	14
5	5	5	5	5	5	5	30
6	4	4	5	5	5	3	26
7	5	5	5	5	3	3	26
8	3	2	3	2	4	2	16
9	5	5	5	3	5	4	27
10	5	4	5	3	3	3	23
11	3	4	3	4	4	4	22
12	4	2	2	4	2	2	16
13	4	5	5	4	5	3	26
14	4	4	2	2	4	2	18
15	4	3	3	4	4	4	22
16	2	4	4	2	3	4	19
17	5	4	3	5	3	4	24
18	4	4	4	4	4	4	24
19	5	4	4	5	5	4	27
20	4	2	3	2	4	2	17
21	5	5	5	5	5	5	30
22	4	4	4	5	5	5	27
23	5	5	5	3	3	3	24
24	3	4	4	2	2	3	18
25	5	5	5	5	4	4	28
26	3	5	4	5	3	3	23
27	5	3	5	5	4	3	25

28	4	3	2	2	2	2	15
29	4	3	5	5	5	4	26
30	4	4	3	3	4	4	22
31	4	4	4	4	4	4	24
32	5	5	4	5	5	4	28
33	4	3	4	4	4	3	22
34	3	2	3	3	2	3	16
35	4	5	4	5	3	4	25
36	3	3	4	4	4	4	22
37	4	3	4	4	4	3	22
38	4	2	4	2	4	3	19
39	5	4	4	3	3	4	23
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	4	24
42	3	2	2	2	4	4	17
43	3	3	4	4	4	4	22
44	4	4	4	4	3	3	22
45	4	3	4	4	4	5	24
46	3	2	4	3	2	4	18
47	3	4	3	4	3	5	22
48	4	5	5	5	5	4	28
49	4	4	4	4	4	4	24
50	2	3	2	3	2	3	15
51	4	4	5	4	4	4	25
52	5	5	3	4	4	3	24
53	4	4	4	4	3	3	22
54	4	2	3	3	2	3	17
55	5	3	3	4	4	3	22
56	4	4	4	4	4	3	23
57	3	2	3	2	3	3	16
58	5	5	5	5	5	5	30
59	5	5	5	4	4	5	28
60	5	3	4	3	5	3	23

61	3	2	4	4	2	2	17
62	4	4	5	3	3	5	24
63	5	4	3	3	5	3	23
64	5	3	5	3	3	3	22
65	4	3	2	3	3	2	17
66	4	3	3	4	5	4	23
67	5	3	5	3	3	3	22
68	3	4	3	2	2	4	18
69	5	3	5	5	4	3	25
70	5	4	5	3	3	3	23
71	4	5	4	5	3	3	24
72	4	3	2	3	3	3	18
73	5	5	5	5	5	5	30
74	5	5	5	5	5	5	30

3. Tabulasi Jawaban Responden Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jawaban Responden

No	Pemanfaatan Teknologi Informasi						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	5	4	5	3	5	5	27
2	4	5	4	3	5	4	25
3	5	4	3	4	3	3	22
4	3	2	4	4	3	2	18
5	4	3	3	2	4	2	18
6	4	5	5	5	4	4	27
7	3	2	4	2	2	4	17
8	4	5	5	5	4	4	27
9	4	3	5	4	5	4	25
10	5	3	5	4	3	3	23
11	4	5	4	4	5	4	26
12	5	5	5	4	3	3	25
13	5	3	5	4	3	3	23
14	3	2	4	2	4	2	17
15	5	3	4	4	4	2	22
16	5	5	3	5	4	5	27
17	4	4	5	4	5	3	25
18	5	5	3	5	4	3	25
19	4	4	3	5	5	3	24
20	4	3	4	2	2	3	18
21	5	5	5	5	5	5	30
22	5	5	5	5	5	4	29
23	4	3	3	2	3	2	17
24	4	3	4	4	4	3	22
25	4	4	3	3	4	4	22
26	5	4	5	4	4	3	25
27	4	3	3	2	4	2	18
28	4	5	3	3	5	4	24

29	4	5	3	5	4	4	25
30	4	2	4	2	4	3	19
31	4	3	2	4	2	2	17
32	5	5	3	5	3	3	24
33	3	4	3	2	4	2	18
34	5	4	2	4	4	5	24
35	4	5	5	5	3	3	25
36	3	4	4	3	4	4	22
37	5	4	3	3	2	5	22
38	5	3	5	5	3	4	25
39	3	2	3	2	2	2	14
40	5	4	5	3	5	3	25
41	3	3	2	2	3	2	15
42	5	3	5	5	4	5	27
43	4	2	3	2	3	3	17
44	3	3	3	2	3	2	16
45	4	5	4	4	5	4	26
46	4	4	3	4	4	3	22
47	5	5	5	5	5	5	30
48	5	5	5	5	4	4	28
49	4	5	4	3	5	3	24
50	4	3	2	3	3	2	17
51	3	5	4	4	4	5	25
52	3	4	2	2	4	2	17
53	3	2	2	3	4	2	16
54	5	3	5	3	5	4	25
55	3	3	4	2	3	2	17
56	4	5	4	4	5	5	27
57	5	5	4	4	4	4	26
58	5	5	5	5	5	5	30
59	4	3	5	5	3	4	24
60	5	5	4	4	3	4	25
61	3	4	2	2	3	2	16

62	5	3	5	3	3	4	23
63	4	2	3	4	2	3	18
64	2	4	2	4	2	3	17
65	4	5	5	5	4	3	26
66	5	3	4	5	3	4	24
67	4	5	3	5	5	4	26
68	4	2	2	3	3	2	16
69	5	5	4	5	4	5	28
70	5	2	2	3	4	3	19
71	3	2	3	2	2	3	15
72	4	2	3	4	2	3	18
73	5	5	5	5	5	5	30
74	5	5	5	5	5	5	30

4. Tabulasi Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas

Jawaban Responden

No	Akuntabilitas					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	3	3	3	3	3	15
2	3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	3	15
4	3	3	2	3	2	13
5	4	3	4	4	4	19
6	3	3	3	4	4	17
7	3	4	4	4	4	19
8	3	2	2	2	3	12
9	3	4	4	4	3	18
10	3	4	3	3	3	16
11	4	4	3	4	3	18
12	3	3	4	3	4	17
13	3	4	4	4	3	18
14	2	4	2	4	2	14
15	4	3	4	4	4	19
16	2	2	2	2	2	10
17	3	4	4	3	3	17
18	4	3	4	3	4	18
19	4	3	3	3	3	16
20	2	2	2	2	2	10
21	5	3	4	3	4	19
22	4	4	3	3	3	17
23	3	3	3	3	3	15
24	2	2	2	2	2	10
25	3	3	3	3	3	15
26	4	3	3	3	4	17
27	4	4	3	4	4	19
28	2	2	2	2	2	10

29	3	4	3	4	3	17
30	3	5	3	3	5	19
31	3	4	3	3	4	17
32	3	3	4	4	3	17
33	4	3	3	4	4	18
34	2	2	2	2	2	10
35	3	4	3	4	3	17
36	3	3	4	3	3	16
37	3	5	3	4	4	19
38	2	4	2	4	2	14
39	3	5	3	5	3	19
40	3	3	4	4	4	18
41	4	3	4	3	5	19
42	2	2	2	2	2	10
43	4	3	5	4	3	19
44	3	3	3	3	3	15
45	3	3	3	4	3	16
46	2	2	2	2	2	10
47	3	3	4	5	4	19
48	4	3	3	3	4	17
49	3	3	3	4	5	18
50	2	2	2	2	2	10
51	3	3	3	4	4	17
52	4	3	3	4	3	17
53	3	4	3	3	3	16
54	2	2	2	2	2	10
55	3	4	3	3	4	17
56	4	4	4	3	3	18
57	2	2	2	2	2	10
58	4	3	4	3	4	18
59	3	4	4	3	3	17
60	3	3	3	3	3	15
61	2	2	3	2	2	11

62	3	3	3	3	3	15
63	3	4	4	3	5	19
64	4	3	3	4	5	19
65	2	2	4	4	2	14
66	3	3	3	3	4	16
67	4	4	3	3	3	17
68	2	3	2	2	3	12
69	3	3	3	3	5	17
70	4	3	4	3	3	17
71	3	4	3	3	5	18
72	2	3	2	3	2	12
73	3	3	4	3	3	16
74	3	3	3	4	4	17

Lampiran 8 : Data Variabel Independen dan Dependen

Responden	DATA VARIABEL INDEPENDEN DAN DEPENDEN			
	Kompetensi Aparatur	Partisipasi Masyarakat	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Akuntabilitas
1	22	22	27	15
2	22	22	25	15
3	25	21	22	15
4	19	14	18	13
5	25	30	18	19
6	20	26	27	17
7	22	26	17	19
8	19	16	27	12
9	28	27	25	18
10	29	23	23	16
11	27	22	26	18
12	18	16	25	17
13	29	26	23	18
14	21	18	17	14
15	27	22	22	19
16	18	19	27	10
17	24	24	25	17
18	20	24	25	18
19	30	27	24	16
20	18	17	18	10
21	28	30	30	19
22	27	27	29	17
23	23	24	17	15
24	16	18	22	10
25	24	28	22	15
26	28	23	25	17
27	23	25	18	19
28	17	15	24	10
29	23	26	25	17

30	24	22	19	19
31	23	24	17	17
32	29	28	24	17
33	22	22	18	18
34	16	16	24	10
35	30	25	25	17
36	26	22	22	16
37	24	22	22	19
38	16	19	25	14
39	24	23	14	19
40	27	24	25	18
41	22	24	15	19
42	18	17	27	10
43	22	22	17	19
44	22	22	16	15
45	29	24	26	16
46	17	18	22	10
47	28	22	30	19
48	27	28	28	17
49	22	24	24	18
50	15	15	17	10
51	23	25	25	17
52	23	24	17	17
53	22	22	16	16
54	17	17	25	10
55	22	22	17	17
56	22	23	27	18
57	17	16	26	10
58	22	30	30	18
59	23	28	24	17
60	23	23	25	15
61	16	17	16	11
62	22	24	23	15
63	23	23	18	19
64	22	22	17	19

65	16	17	26	14
66	30	23	24	16
67	30	22	26	17
68	13	18	16	12
69	24	25	28	17
70	24	23	19	17
71	22	24	15	18
72	15	18	18	12
73	23	30	30	16
74	24	30	30	17

Lampiran 9 : Uji Kualitas Data

5. Uji Validitas

a. Kompetensi Aparatur

		Correlations						
		KA.1	KA.2	KA.3	KA.4	KA.5	KA.6	Total_KA
KA.1	Pearson Correlation	1	.328**	.281*	.337**	.250*	.377**	.565**
	Sig. (2-tailed)		.004	.015	.003	.031	.001	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
KA.2	Pearson Correlation	.328**	1	.536**	.496**	.521**	.595**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.004		.000	.000	.000	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
KA.3	Pearson Correlation	.281*	.536**	1	.344**	.647**	.526**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.015	.000		.003	.000	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
KA.4	Pearson Correlation	.337**	.496**	.344**	1	.378**	.516**	.692**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.003		.001	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
KA.5	Pearson Correlation	.250*	.521**	.647**	.378**	1	.607**	.779**
	Sig. (2-tailed)	.031	.000	.000	.001		.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
KA.6	Pearson Correlation	.377**	.595**	.526**	.516**	.607**	1	.827**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000		.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
Total_KA	Pearson Correlation	.565**	.792**	.756**	.692**	.779**	.827**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	74	74	74	74	74	74	74

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Partisipasi Masyarakat

		Correlations						
		PM.1	PM.2	PM.3	PM.4	PM.5	PM.6	Total_PM
PM.1	Pearson Correlation	1	.436**	.481**	.394**	.448**	.156	.654**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000	.185	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
PM.2	Pearson Correlation	.436**	1	.509**	.516**	.399**	.462**	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
PM.3	Pearson Correlation	.481**	.509**	1	.475**	.395**	.426**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
PM.4	Pearson Correlation	.394**	.516**	.475**	1	.451**	.418**	.760**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
PM.5	Pearson Correlation	.448**	.399**	.395**	.451**	1	.434**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
PM.6	Pearson Correlation	.156	.462**	.426**	.418**	.434**	1	.665**
	Sig. (2-tailed)	.185	.000	.000	.000	.000		.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
Total_PM	Pearson Correlation	.654**	.773**	.759**	.760**	.722**	.665**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	74	74	74	74	74	74	74

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

		Correlations						
		PTI.1	PTI.2	PTI.3	PTI.4	PTI.5	PTI.6	Total PTI
PTI.1	Pearson Correlation	1	.329**	.448**	.533**	.292*	.504**	.677**
	Sig. (2-tailed)		.004	.000	.000	.012	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
PTI.2	Pearson Correlation	.329**	1	.304**	.562**	.546**	.545**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.004		.009	.000	.000	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
PTI.3	Pearson Correlation	.448**	.304**	1	.433**	.366**	.477**	.690**
	Sig. (2-tailed)	.000	.009		.000	.001	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
PTI.4	Pearson Correlation	.533**	.562**	.433**	1	.296*	.563**	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.010	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
PTI.5	Pearson Correlation	.292*	.546**	.366**	.296*	1	.416**	.664**
	Sig. (2-tailed)	.012	.000	.001	.010		.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
PTI.6	Pearson Correlation	.504**	.545**	.477**	.563**	.416**	1	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	74	74	74	74	74	74	74
Total_PTII	Pearson Correlation	.677**	.766**	.690**	.783**	.664**	.801**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	74	74	74	74	74	74	74

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

d. Akuntabilitas

		Correlations					
		A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	Total_A
A.1	Pearson						
	Correlation	1	.356**	.605**	.407**	.591**	.775**
	Sig. (2-tailed)		.002	.000	.000	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74
A.2	Pearson						
	Correlation	.356**	1	.332**	.552**	.413**	.699**
	Sig. (2-tailed)	.002		.004	.000	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74
A.3	Pearson						
	Correlation	.605**	.332**	1	.500**	.495**	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004		.000	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74
A.4	Pearson						
	Correlation	.407**	.552**	.500**	1	.407**	.751**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74
A.5	Pearson						
	Correlation	.591**	.413**	.495**	.407**	1	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	74	74	74	74	74	74
Total_A	Pearson						
	Correlation	.775**	.699**	.767**	.751**	.788**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	74	74	74	74	74	74

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas

a. Kompetensi Aparatur

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.833	6

b. Partisipasi Masyarakat

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.818	6

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.824	6

d. Akuntabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.811	5

Lampiran 10 : Nilai r Tabel

**Tabel Nilai r Product
Moment**

N	Taraf Signif		N	Taraf Signif		N	Taraf Signif	
	5%	10%		5%	10%		5%	10%
3	0,997	0,999	27	0,381	0,487	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	28	0,374	0,478	60	0,254	0,330
5	0,878	0,959	29	0,367	0,470	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	30	0,361	0,463	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	31	0,355	0,456	75	0,227	0,296
8	0,707	0,834	32	0,349	0,449	80	0,220	0,286
9	0,666	0,798	33	0,344	0,442	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	34	0,339	0,436	90	0,207	0,270
11	0,602	0,735	35	0,334	0,430	95	0,202	0,263
12	0,576	0,708	36	0,329	0,424	100	0,195	0,256
13	0,553	0,684	37	0,325	0,418	125	0,176	0,230
14	0,532	0,661	38	0,320	0,413	150	0,159	0,210
15	0,514	0,641	39	0,316	0,408	175	0,148	0,194
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	200	0,138	0,181
17	0,482	0,606	41	0,308	0,398	300	0,113	0,148
18	0,468	0,590	42	0,304	0,393	400	0,098	0,128
19	0,456	0,575	43	0,301	0,389	500	0,088	0,115
20	0,444	0,561	44	0,297	0,384	600	0,080	0,105
21	0,433	0,549	45	0,294	0,380	700	0,074	0,097
22	0,423	0,537	46	0,291	0,376	800	0,070	0,091
23	0,413	0,526	47	0,288	0,372	900	0,065	0,086
24	0,404	0,515	48	0,284	0,368	1000	0,062	0,081
25	0,396	0,505	49	0,281	0,364			
26	0,388	0,496	50	0,279	0,361			

Lampiran 11 : Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur	74	13.00	30.00	22.6081	4.25173
Partisipasi Masyarakat	74	14.00	30.00	22.5270	4.05518
Pemanfaatan Teknologi Informasi	74	14.00	30.00	22.5405	4.46965
Akuntabilitas	74	10.00	19.00	15.7703	2.94492
Valid N (listwise)	74				

Lampiran 12 : Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		74
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.34163074
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.061
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.878	1.485		3.285	.002		
Kompetensi Apaatur	.276	.068	.399	4.040	.000	.533	1.878
Partisipasi Masyarakat	.366	.072	.505	5.109	.000	.532	1.879
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.160	.049	-.243	-3.246	.002	.926	1.080

a. Dependent Variable: Total_A

Lampiran 13 : Analisis Regresi Liner Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.878	1.485		3.285	.002
Kompetensi Aparatur	.276	.068	.399	4.040	.000
Partisipasi Masyarakat	.366	.072	.505	5.109	.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.160	.049	-.243	-3.246	.002

a. Dependent Variable: Total_A

Lampiran 14 : Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.878	1.485		3.285	.002
Kompetensi Aparatur	.276	.068	.399	4.040	.000
Partisipasi Masyarakat	.366	.072	.505	5.109	.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.160	.049	-.243	-3.246	.002

a. Dependent Variable: Total_A

2. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.798 ^a	.636	.621	1.81324

a. Predictors: (Constant), Total_PTl, Total_KA, Total_PM

Lampiran 15 : Nilai t Tabel

Tabel Nilai t

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471

64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526